

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF.

isi September III Tahun 2021 No. 19

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*H. Alifudin, S.E., M.M*

*Pujian Penanganan Pandemi  
oleh Sejumlah Menteri*

*Jauh  
Panggung  
dari Api*



# Hati-hati Jebakan Pujian dan Kekuasaan

Percayalah suara kritik itu akan memilih jalan lain, langkah yang tidak biasa. Jalur formal estetis sejengkal goresan Mural yang viral. Mural itu adalah salah satu bentuk perlawanan publik terkait kondisi yang ada, sedang terjadi pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya.

Pujian itu seringkali melenenakan seseorang, karena disaat bersamaan menutup diri terhadap berbagai kritikan atau masukan dari orang-orang yang tidak sependapat. Sudah dibuktikan dalam banyak torehan sejarah. Pujian disaat berkuasa, lebih terasa dibandingkan saat tak punya daya. Kala itu mimpi lebih nyaman diisi dengan halusinasi harapan, dibandingkan amputasi keinginan. Maka jika ada yang mencoba menghentikan pujian, lebih baik diamankan.

Tidak selamanya kritikan dimulai dengan kebencian, bisa

jadi berangkat dari kegelisahan dan rasa kasihan. Agar tidak semakin jauh terjerembab, kemudian sulit menarik kembali ke titik normal. Awalnya pujian bagai lantai yang mulus dan gaun yang halus, akhirnya tidak jarang bisa membuat tergelincir.

Pujian itu sejatinya hanya melihat satu sisi dari kepemimpinan, karena dia tidak butuh alternatif pesan yang berbeda. Bahkan jika perlu disakralkan, glorifikasi dan dilembagakan. Awalnya pujian bisa berupa kata-kata, akhirnya seringkali menyangkut marwah dan kharisma. Bahkan angin

sekalipun tidak boleh menggoyahkan bingkai foto orang yang dipuji.

Pujian itu hadir dari orang-orang yang mengharapkan sesuatu dan mendapatkan manfaat. Tidak mengapa sejatinya karena begitulah tabiat hidup; berharap dan takut kehilangan. Tapi jika tidak sesuai kenyataan dan hanya sekedar sedang berwenang, maka akhirnya akan jadi persoalan.

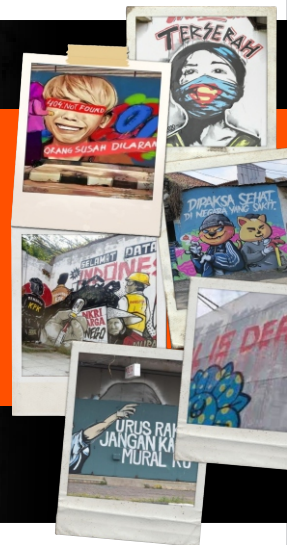
Seorang pemimpin mungkin dipuji telah berhasil melakukan penanganan pandemi wabah covid 19 oleh kolega-kolega politiknya. Tapi

dilakukan dalam ruang hampa, maka suara resah dan parau dari luar tidak akan terdengar. Kedap.

Percayalah suara kritik itu akan memilih jalan lain, langkah yang tidak biasa. Jalur formal estetis sejengkal goresan Mural yang viral. Mural itu adalah salah satu bentuk perlawanan publik terkait kondisi yang ada, sedang terjadi pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya.

Oleh karenanya hati-hati dengan jebakan pujian karena pada akhirnya dia hanya akan semakin menenggelamkan

kepemimpinan tersebut ke dalam satu situasi yang pada akhirnya dia tidak bisa keluar dari situ. Layaknya pasir hisap yang akan semakin menarik kuat. Kita juga khawatir pujian akan menyandera karena memunculkan perasaan punya hutang budi. Terhadap orang yang memuji kemudian akan berpikir 12 kali atau bahkan ratusan kali untuk mengambil keputusan yang terkait pada orang-orang memuji. Sehingga tidak bisa tegak berdiri dan lantang bersuara berjalan dengan baik.



# Soroti Pujian Penanganan Pandemi oleh Sejumlah Menteri, Aleg PKS: 'Jauh Panggang dari Api'

## KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Anggota Fraksi PKS Alifudin menegaskan, partainya tetap istiqomah sebagai oposisi meski partai-partai yang berjalan bersama pada Pilpres 2019 lalu menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan.

"PKS tetap bersama rakyat serta terus melayani rakyat sebagai oposisi pemerintah. Karena kekuasaan itu perlu di kritik dan diawasi, agar tidak adanya kekuasaan absolut pada rezim sekarang ini," ujar Alifudin kepada wartawan, Senin, (31/08).

Anggota Komisi IX DPR bidang kesehatan itu pun menyikapi biasa soal banyak ketum parpol yang memuji presiden dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Sah-sah saja para ketua umum Partai koalisi memuji pemerintah dalam penanganan Covid-19, karena bagian dari koalisi pemerintah. Tapi kita

lihat, banyak mural yang beredar, apa rakyat memuji juga?," sindir Alifudin.

Legislator Kalimantan Barat itu menilai, masih banyak kekurangan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Bahkan terkesan sangat lambat dalam mengambil kebijakan sejak awal virus itu menyebar di tanah air.

"Kalau mau di urut satu-satu, banyak sekali kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat apalagi percepatan penanganan Covid-19," tambah Alifudin.

Salah satunya, kata Alifudin, yakni percepatan vaksinasi. Menurutnya, kebijakan vaksinasi masih jauh

dari harapan. Terlebih, ada pejabat yang sudah vaksin booster, namun banyak masyarakat yang belum vaksin dosis pertama.

Untuk itu, Alifudin mengajak masyarakat agar sama-sama mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasinya tentang penanganan pandemi Covid-19.

"Jangan takut kalau benar dan sesuai data, karena keadilan serta kebenaran akan selalu menang," tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden dan para ketum parpol, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai keputusan Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat dan efektif.



**H. ALIFUDIN, S.E., M.M.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

“Masih banyak kekurangan pemerintah dalam menyelesaikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Bahkan terkesan sangat lambat dalam mengambil kebijakan sejak awal virus itu menyebar di tanah air. Kalau mau di urut satu-satu, banyak sekali kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat apalagi percepatan penanganan Covid-19”

# MURAL DIBATASI DEGRADASI DEMOKRASI?

## | PKS : Benahi Moral, Bukan Mural |



### **"DIBUNGKAM"**

Mural di bawah Jembatan Kleringan Kewek, Danurejan, Kota Yogyakarta **dihapus Satpol PP.**

### **"404: NOT FOUND"**

Mural di Batuceper, kota Tangerang **dihapus aparat awal Agustus 2021.** Mural mirip wajah Presiden ini dianggap menghina lambang negara.

### **"DIPAKSA SEHAT DI NEGARA YANG SAKIT"**

Mural di Jl. Diponegoro, Pasuruan, Jawa Timur. **Dihapus aparat awal Agustus 2021.**

### **"TUHAN AKU LAPAR"**

Mural di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. **Dihapus aparat akhir Juli 2021.**

### **"YANG BISA DIPERCAYA DARI TV CUMA ADZAN"**

Mural di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

### **"JOKOWI GAGAL!! CUMA DI ERA INI KORUPTOR HAPPY SELFI"**

Mural di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

### **ORANG MISKIN DILARANG SAKIT #RIP PEMERINTAH'**

Mural di tembok tokoh di pojok perempatan Jl. Sutan Syahrir kawasan Pasar Legi, Solo, **dihapus aparat.**

### **MURAL MIRIP JOKOWI MATANYA DITUTUP MASKER**

Mural di Jl. Prabu Dimuntur, Kota Bandung **dihapus oleh empat orang pria.**

### **"WABAH SESUNGGUHNYA ADALAH KELAPARAN"**

Mural di Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Ciledug, Tangerang.



Mimbar Demokrasi Kebangsaan,

# Ketua Fraksi PKS: Wujud Komitmen PKS terhadap NKRI

**KUTIPAN**

Jakarta (27/08) — Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini memberikan sambutan dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang diselenggarakan secara virtual. Jazuli mengatakan acara ini memiliki nilai spesial dan istimewa karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia.

"Mimbar Demokrasi yang keenam ini memiliki nilai spesial dan istimewa karena kita laksanakan bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai.

Dirangkai dengan penganugerahan dan penyerahan hadiah bagi para pemenang Lomba Baca Teks Mirip Suara Soekarno," kata Jazuli.

Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Soekarno ini merupakan wujud komitmen keluarga besar PKS terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Lomba ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen

**#MIMBAR  
DEMOKRASI  
KEBANGSAAN  
FRAKSI PKS DPR RI**

kebangsaan keluarga besar PKS terhadap NKRI. Untuk menjaga NKRI, perlu ditanamkan hati seluruh anak bangsa rasa cinta dan rasa bangga kepada bangsa Indonesia. Perlu terus dikumpulkan nilai nilai spirit kebangsaan, semangat pengorbanan dan kita berupaya untuk meneladani para pahlawan," pungkias Jazuli.

Jazuli menambahkan tujuan Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Lomba Baca Teks

Proklamasi Mirip Suara Soekarno setiap tahun adalah untuk membangkitkan pemahaman kepada generasi Indonesia agar tetapi memahami komitmen tentang nilai kebangsaan.

"Tujuan kedua adalah untuk membangkitkan pemahaman kepada generasi Indonesia agar tetap memahami dan memiliki komitmen besar tentang nilai nilai kebangsaan dan semangat pengorbanan para pahlawan," tutur Jazuli.

Perkembangan teknologi dan informasi. Menurut Jazuli berkembang begitu pesat, PKS sebagai salah satu komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengokohkan nilai nilai kebangsaan agar tidak terkikis dengan globalisasi.

"Kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat tentang kebangsaan kita, bisa jadi nilai kebangsaan akan terkikis dengan nilai globalisasi yang merupakan efek perkembangan teknologi. Disinilah pentingnya semua komponen bangsa, harus berusaha bahu membahu untuk mengokohkan nilai kebangsaan," pungkias Jazuli.  
Anggota DPR RI dapil Ban-



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Lomba ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen kebangsaan keluarga besar PKS terhadap NKRI. Untuk menjaga NKRI, perlu ditanamkan hati seluruh anak bangsa rasa cinta dan rasa bangga kepada bangsa Indonesia. Perlu terus dikumpulkan nilai nilai spirit kebangsaan, semangat pengorbanan dan kita berupaya untuk meneladani para pahlawan"

ten II ini berharap penyelenggaraan Mimbar Demokrasi Kebangsaan ini dapat menjadi ruang untuk bertukar pikiran dan alat kontrol agar nilai kebangsaan semakin berkualitas. Program ini merupakan salah satu upaya

PKS dalam menjaga prinsip kebangsaan agar tidak menyimpang dari dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Mimbar Demokrasi Kebangsaan,

# Dokter Salim Ajak Masyarakat Bersatu Untuk Kemajuan Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (27/08) — Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri memberikan orasi kebangsaan bertajuk 'Proklamasi: Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur' guna memperingati hari kemerdekaan serta anugerah lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno 2021.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan peringatan proklamasi kemerdekaan di bulan Agustus ini sebagai momentum untuk mengkokohkan komitmen kebangsaan kita," ujar Dokter Salim dalam webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS, Jumat (27/08).

Mantan Menteri Sosial ini menuturkan, tidak mudah menyatukan bangsa Indonesia kecuali komitmen kebangsaan yang kuat untuk bersatu menemukan titik temu, yakni Pancasila sebagai negara.

"Bangsa Indonesia akan

## #MIMBAR DEMOKRASI KEBANGSAAN FRAKSI PKS DPR RI

mencapai kemajuan jika kita memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," tuturnya.

Komitmen tersebut antara lain menjaga persatuan dan kesatuan nasional, komitmen untuk mengelola kohesivitas sosial ditengah beragam masalah yang berkelindan berbagai macam kepentingan.

Menurut Dokter Salim, bangsa Indonesia akan menjadi

besar dan maju bila kita saling bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan lainnya.

"Hakikat dari kemerdekaan adalah tegaknya kedaulatan suatu bangsa untuk mewujudkan kepentingan nasional," tandasnya.

Kedaulatan dalam bidang ekonomi misalnya, Dokter Salim menuturkan bahwa perlu hadir sistem perekonomian yang memusatkan pada rakyat untuk dapat merasakan manfaatnya. Karena cita-cita dari kemerdekaan Indonesia adalah hadirnya negeri yang adil dan makmur.

Adil dan makmur bisa terwujud bilamana Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat. Meski demikian, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Dokter Salim memandang hal tersebut adalah tantangan bersama.

"Demokrasi kita bergebang sedemikian rupa, tapi sayangnya melupakan makna fundamental dari demokrasi itu sendiri, yaitu lahirnya kesejahteraan," tukasnya.

Dokter Salim melanjutkan,



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Bangsa Indonesia akan menjadi besar dan maju bila kita saling bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan lainnya. Hakikat dari kemerdekaan adalah tegaknya kedaulatan suatu bangsa untuk mewujudkan kepentingan nasional?"

dalam demokrasi kerakyatan misalnya, bukan hanya fokus untuk menang dalam pemilihan suara, tetapi juga mengutamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

"Demokrasi kerakyatan adalah demokrasi yang berdiri tegak diatas orientasi etis, daya rasa rasionalitas dan kearifan untuk mencapai konsensus," tutupnya.

Mimbar Demokrasi Edisi Kemerdekaan

# Ketua MPR RI: Masih Banyak yang Harus Kita Perjuangkan Bersama

## KUTIPAN

Jakarta (27/08) — Ketua MPR RI, Bambang Susatyo menjadi salah satu pembicara dalam forum Mimbar Demokrasi Spesial Kemerdekaan, yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI. Bambang mengatakan bahwa forum ini dapat menjadi sarana penguatan kebangsaan rakyat Indonesia.

"Mimbar demokrasi dan kebangsaan ini dapat menjadi sarana untuk mengingatkan kita semua bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir tapi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia." Ujar Bambang.

Peringatan kemerdekaan juga merupakan kesempatan untuk menjadi momentum perenungan. Lebih dari tiga per empat abad kita jalani sebagai bangsa yang merdeka, banyak yang sudah kita raih dan masih banyak juga yang harus kita

**#MIMBAR**  
DEMOKRASI  
KEBANGSAAN  
FRAKSI PKS DPR RI

perjuangkan bersama.

"Peringatan kemerdekaan adalah momentum sakral yang daripadanya dihadapkan pada tiga pertanyaan: Apa yang telah kita pelajari dari sejarah masa lalu? Apa yang telah kita capai pada hari ini? Serta apa yang kita rencanakan untuk masa depan?" Ucap Bambang.

Perjuangan Indonesia pada umumnya yang ke-76 akan

terasa sangat sulit akibat pandemi yang masih terus berjalan. Tidak hanya kesehatan, pandemi juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 1,12 juta. Namun begitu, Bambang berharap bahwa dengan semangat kemerdekaan, segenap hadirin tetap berkarya dan membangun optimisme ditengah Covid-19.

"Masih ada hikmah yang dapat kita syukuri, yaitu menguatnya solidaritas kebangsaan kita. Kita juga patut bersyukur bahwa setelah 9 bulan terpukul ekonomi, kita bisa keluar dari jurang resesi dengan pertumbuhan 7,07%" Tutur Bambang.

Selain itu, adanya bonus demografi di Indonesia juga merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk tetap tangguh menghadapi tantangan kebangsaan dan bertumbuh untuk menyongsong Indonesia emas 2045.



**H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.**  
Ketua MPR RI

"Peringatan kemerdekaan adalah momentum sakral yang daripadanya dihadapkan pada tiga pertanyaan: Apa yang telah kita pelajari dari sejarah masa lalu? Apa yang telah kita capai pada hari ini? Serta apa yang kita rencanakan untuk masa depan?"

# UTANG RI TEMBUS 6000 TRILIYUN

## PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Pengelolaan Utang Negara

■ Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.

↑ Total utang sepanjang tahun 2020

**Rp6.080,08 triliun** 39,4% terhadap PDB.

↑ Kenaikan utang sepanjang tahun 2020

**Rp1.293,5 triliun** naik 27,02% dari tahun 2019

↑ Beban bunga meningkat

**Rp317,89 triliun** naik 14,67% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp277,23 triliun.

■ Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.



# Pemerintah Banggakan Ekonomi RI Sudah Pulih, Aleg PKS: **Oversimplifikasi!**

## KUTIPAN

Jakarta (06/09) --- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada Kongres ISEI XXI menyatakan ekonomi Indonesia pulih ke level sebelum pandemi pada kuartal kedua tahun ini, bahkan lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Klaim Menkeu tersebut berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih baik dari pada negara tetangga Malaysia dan Singapura yang belum melebihi PDB sebelum pandemi.

Anggota DPR RI dari FPKS Anis Byarwati menyebut bahwa perbandingan yang dikatakan Menkeu tidak komprehensif.

"Pemerintah menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara parsial, padahal secara alamiah PDB per kuartal paling tinggi ada di kuartal III, perlu dibuktikan dulu apakah nanti kuartal ke III 2021 bisa tumbuh lebih tinggi dari kuartal II 2021 atau sebaliknya, jadi tidak bisa oversimplifikasi kita sudah pulih. Sebagai catatan Singapura itu sudah tumbuh

positif 1,5 persen sejak kuartal I 2021, di saat yang sama Indonesia masih minus 0,7 persen" kata Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS di Jakarta (05/09/2021).

Anis juga menjelaskan Singapura, Malaysia, dengan Indonesia secara basis ekonominya berbeda.

"Singapura basis ekonomi perdagangan internasional, sementara kita dominan didorong konsumsi rumah tangga. Mereka pun merespon cepat varian delta dengan pembatasan ketat, pun Malaysia lockdown dari awal, prioritas mereka kesehatan" ujarnya.

Anggota Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan berdasarkan proyeksi terakhir IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun

2021 ini bahkan dibawah rata-rata negara yang dikategorikan ASEAN-5 (4.9%) seperti Filipina (6.9%), Malaysia (6.5%), dan Vietnam (6.5%).

"Indonesia hanya berada diatas Thailand (2.6%), tetapi juga masih jauh berada dibawah rata-rata negara-negara berkembang di Asia (Emerging and Developing Asia) dan negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah umumnya (Emerging Market and Middle-Income Economies) yang diproyeksi akan tumbuh masing-masing 8.6% dan 6.9%" sebutnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyayangkan pemerintah sibuk pada data pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sedangkan berdasarkan proyeksi IMF ekonomi Indonesia selalu turun di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 6 persen pada tahun 2021.

"Sayangnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia justru turun terus menjadi 4.3 persen dari 4.8 persen proyeksi bulan Januari dan turun lagi 3,9 persen proyeksi bulan Juli," katanya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Pemerintah harus fokus kepada tantangan ekonomi jangka panjang yang tidak bisa hanya dengan membanggakan pertumbuhan ekonomi kuartal yang semu. Tantangan kedepan lebih berat, adanya tapering off bank sentral AS, risiko imported inflation (inflasi karena harga barang impor naik), dan pemulihan ekonomi tidak merata di semua sektor"

Berdampak Tak Maksimal pada Penanganan Pandemi dan Kesejahteraan Rakyat

## Fraksi PKS Kritisi Pelaksanaan APBN Pemerintah Tahun 2020

### KUTIPAN

Jakarta (06/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini,

Juga dihadiri Wakil Ketua FPKS Bidang Ekuitek, Ecky Awal Mucharram, Wakil Ketua FPKS Bidang Polhukam, Sukamta, Wakil Sekretaris FPKS, Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi XI FPKS yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekuin, Anis Byarwati, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

Dalam keterangan yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Ekuin, Ecky Awal Mucharram mengatakan, secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya penanganan

pandemi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan jangka kebijakan ekonomi utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi," tegas Ecky.

Pelaksanaan APBN, lanjut Ecky, juga perlu terus memperhatikan aspek kesinambungan fiskal dan keadilan antar generasi. Selanjutnya, dalam menyikapi hasil pembicaraan terkait RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2020, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan.

"Pertama, Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19. Tercatat total utang Pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap PDB. Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang dibayarkan," terang Ecky.

Nilai tersebut, imbuh Ecky, menjadi sejarah baru bahwa akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran, dan rasio utang terhadap PDB tahun 2020 menjadi yang tertinggi. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. ECKY AWAL MUCHARAM**  
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan

"Jumlah pengangguran tahun 2020 juga memecahkan rekor dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 2,67 juta orang, sehingga total TPT menjadi sebanyak 9,77 juta jiwa atau 7,07% dari angka angkatan kerja. Pada 2020 pengangguran usia muda Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Pengangguran usia muda di Indonesia meroket di angka 20,5%, padahal rata-rata pengangguran angkatan kerja muda di Dunia sebesar 13,7%,"

# Ingatkan Pemerintah agar Tak Terlenu Pujian, **Aleg PKS: Kontras dengan Kritik Mural Rakyat**

**KUTIPAN**

Jakarta (30/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, meminta pemerintah agar tidak terlenu dengan pujian koalisi bahwa penanganan pandemi sudah on the track.

"Harus dianalisa dulu semua core indikator penanganan pandemi, benarkah statistiknya sudah membaik? Bahaya jika pemerintah sampai terlenu dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," katanya dalam keterangan media, Senin, (30/08).

Meskipun kasus harian Covid-19 sudah menunjukkan penurunan, namun, kata Netty, Indonesia masih berada di masa krisis pandemi.

"Dari sektor kesehatan kasus kita masih tinggi, positivity rate masih di atas standar WHO. Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah

pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," jelasnya.

Selain itu, menurut Netty, pencairan insentif nakes dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah.

"Bahkan sejumlah daerah masih berada pada zona merah atau PPKM Level 4. Jadi pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?" tambahnya.

Ketua DPP PKS mengatakan, pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta di lapangan.

"Rakyat banyak yang gelisah, susah dan tidak tahu harus berbuat apa. Jumlah pengangguran dan PHK meningkat, angka kemiskinan bertambah, usaha rakyat banyak yang tutup atau kembang kempis, sementara bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," jelas Netty.

Sayangnya, ujar Netty, saat rakyat mengekspresikan keresahannya melalui kritik mural (berupa lukisan dan tulisan di tembok), aparat pemerintah justru melakukan penghapusan. "Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puja-puja yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Netty sudah saatnya pemerintah fokus penanganan Covid & jangan sampai terbuai pujian.

"Pastikan semua sektor berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama. Jangan sampai di satu sisi dilakukan pengetatan, sementara di sisi lain masih ada program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," ujar Netty.

Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun. "Tujuan kritik itu untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat. Jadi jangan dianggap angin lalu bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini melewati krisis," tandasnya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Sektor kesehatan kasus kita masih tinggi, positivity rate masih di atas standar WHO. Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak,"

# HNW **Dukung** Sikap Aliansi Penyelenggara Pendidikan Soal Dana BOS dan Desak Keadilan Anggaran untuk Madrasah

## KUTIPAN

Jakarta (04/09) --- Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, NU, Persatuan Guru Republik Indonesia dan lainnya,

yang menolak aturan baru Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 sebagai aturan yang diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

HNW sapaan akrabnya menilai Dana BOS seharusnya diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi serta menjadi hak setiap murid, dalam rangka Negara melaksanakan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahkan, selain diskrimina-

si dalam aturan baru Permendikbud 6/2021 soal syarat minimal 60 peserta didik di lembaga pendidikan untuk mendapatkan Dana BOS, HNW juga mengkritisi adanya ketidakadilan anggaran antara APBN untuk Sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud dengan Sekolah-sekolah Kemenag, yang sebagiannya tercermin dalam diskriminasi soal pembagian Dana BOS di antara keduanya.

Fraksi PKS, kata HNW, saat Raker dengan Kemenag, sudah berulang kali menyuarakan

pentingnya keadilan anggaran sehingga alokasi anggaran dan Dana BOS bagi Kemendikbud dan Kemenag bersifat adil dan proporsional, namun hingga kini berbagai aspirasi dan kritik tersebut belum juga direalisasikan oleh Pemerintah.

"Saya dukung kritik NU, Muhammadiyah, PGRI dan lainnya soal jumlah siswa minimal sebagai syarat penerima Dana BOS, agar terjadi keadilan dan tidak diskriminatif, sekaligus kembali mengingatkan Pemerintah soal kritik dan saran kami untuk pentingnya keadilan anggaran dan tidak terjadinya diskriminasi alokasi Dana BOS antara lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud dengan Kemenag. Semoga kedua persoalan tersebut bisa dituntaskan segera dalam koridor pemenuhan keadilan, sesuai dengan Pancasila serta UUD NRI 1945," ujar Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (04/09).

Idayat yang merupakan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"UUD jelas tidak menginginkan adanya ketidakadilan anggaran dan diskriminasi dalam hal akses kepada bantuan pendidikan, baik itu diskriminasi dalam bentuk jumlah minimal siswa sebagaimana aturan Permendikbud 6/2021"

Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi urusan agama ini menjelaskan, pada tahun 2021 misalkan, alokasi Dana BOS untuk sekolah di bawah Kemendikbud sebesar Rp 52,5

Triliun yang diberikan kepada 216.662 satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Wakil Ketua Komisi I FPKS: Pemerintah **Perlu Melakukan** Audit, Tes, dan Pemeriksaan Siber Berkala

## KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, mendorong pemerintah untuk melakukan tes, audit dan pemeriksaan siber secara berkala di Indonesia.

Hal ini, menurut Kharis, berkaitan dengan peningkatan serangan siber yang terus menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini.

“Pemerintah perlu secara rutin memonitor dan memeriksa keamanan siber, dalam rangka meningkatkan keamanan siber di Indonesia” ujar Kharis dalam keterangan tertulis kepada Media, Selasa (31/08).

Abdul Kharis menyoroti fakta di mana badan pemerintahan di Indonesia rentan menjadi korban peretasan di sepanjang tahun 2021.

“Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terdapat 291 website milik pemerintah yang terkena peretasan dan disusupi konten-

konten judi online” ujar Kharis, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Kharis menegaskan bahwa Keamanan siber, khususnya bagi website-website yang memiliki fungsi pelayanan publik harus terlindungi dan terjaga dengan baik, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Ini jadi catatan bagi kami di Komisi 1 DPR RI bagaimana keamanan siber menjadi prioritas terutama Website yang berkaitan dengan data pribadi dan pelayanan kepada Masyarakat” tegas Kharis.

Selain itu, Abdul Kharis melanjutkan, pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga semakin perlu

untuk dilakukan.

“RUU PDP semakin perlu untuk segera disahkan, karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data, termasuk instansi milik pemerintah Proses audit tersebut akan mewajibkan seluruh pihak dan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.” ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kharis juga berpendapat bahwa pada era pandemi COVID-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam berkegiatan di dunia maya.

“Ironisnya, sebagian dari website yang diretas itu adalah lembaga pendidikan dan pelayanan publik, jadi ini sangat mengkhawatirkan” pungkas Abdul Kharis.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa terdapat 291 situs milik pemerintah disusupi konten judi online oleh para peretas sepanjang tahun ini. Adapun peretasan tersebut terdiri dari 23 persen perguruan



**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**  
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

“RUU PDP semakin perlu untuk segera disahkan, karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data, termasuk instansi milik pemerintah Proses audit tersebut akan mewajibkan seluruh pihak dan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.”

tinggi negeri (68 situs), 13 persen sekolah (38 situs), pemerintahan (37 situs), dan 51 persen situs milik pemerintah

lainnya. Situs web perguruan tinggi menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online.

# Syaikhu Kunjungan Kerja DPR ke Korem 074 Warastratama Surakarta

## KUTIPAN

Surakarta (29/08) -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Komando Resor Militer (Korem) 074 Warastratama di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (27/8/2021).

Korem 074 Warastratama membawahi tujuh kota/kabupaten di wilayah Solo Raya.

Syaikhu mengatakan data paparan kasus aktif di Solo Raya termasuk baik dengan turunnya kasus aktif. Meski begitu, Syaikhu mengingatkan adanya ancaman kasus kembali naik jika masyarakat mulai menganggap Covid-19 bisa dikhianati.

"Sejauh mana TNI khususnya Korem 074 melakukan antisipasi adanya ancaman penyebaran kembali massif jika publik merasa sudah aman. Apalagi saat ini varian Delta dan kemungkinan adanya varian lain susah diprediksi," ungkap Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti laporan vaksinasi yang masih

belum merata di tujuh kota/kabupaten di wilayah Solo Raya. Belum meratanya vaksin di Solo Raya berpotensi semakin tertundanya tercapainya kekebalan kelompok.

"Kita juga butuh kolaborasi. TNI tidak bisa sendirian bagaimana harus berkolaborasi dengan pemangku jabatan lainnya baik Polri dan Pemerintah Daerah. Termasuk dengan tokoh masyarakat guna mengantisipasi penolakan vaksinasi dan upaya penanggulangan lainnya," ujar Syaikhu.

Danrem 074 Warastratama, Kolonel (Inf) Deddy Suryadi mengatakan Korem 074 Warastratama turut berperan aktif dalam menanggulangi kasus Pandemi Covid-19.

Deddy menyebut wilayah

Solo Raya sempat tinggi diduga karena varian Delta yang terdeteksi pertama di daerah Kudus. Berkat kerja keras semua pihak, ujar Deddy, saat ini kasus aktif tinggal 1,99 persen yakni 2.995 kasus aktif per 25 Agustus 2021.

Deddy menyebut TNI di bawah komando Kodim per kabupaten/kota di Solo Raya telah melakukan beberapa aksi untuk membantu menekan kasus penularan Covid-19 di wilayah Solo Raya.

"Korem 074 Warastratama bersama tujuh Kodim di Solo Raya ikut menggelar proses vaksinasi, dukungan obat untuk masyarakat, pembagian beras dan sembako dengan peran Babinsa di setiap desa dan kelurahan membantu upaya dalam penanggulangan Covid-19," papar Deddy.



## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi I DPR RI

"Kita juga butuh kolaborasi. TNI tidak bisa sendirian bagaimana harus berkolaborasi dengan pemangku jabatan lainnya baik Polri dan Pemerintah Daerah. Termasuk dengan tokoh masyarakat guna mengantisipasi penolakan vaksinasi dan upaya penanggulangan lainnya,"



# Data Pengguna Aplikasi eHAC Bocor Wakil Ketua FPKS: Lagi-lagi Pemerintah **Teledor** Lindungi Data Pribadi

## KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Aplikasi eHAC yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk menampung data telusur Covid-19 serta berisi identitas lengkap seseorang yang hendak bepergian, ditemukan alami kebocoran. Temuan ini disampaikan oleh Tim peneliti vpnMentor, Noam Rotem dan Ran Locar.

Terkait kebocoran data ini, Anggota Komisi 1, Sukamta menyatakan kehabisan kata-kata atas ketelodaran pemerintah dalam perlindungan data pribadi. Mengingat kejadian serupa telah sering terjadi seperti bocornya 279 data peserta BPJS belum lama ini.

"Baru Senin kemarin kami rapat dengan Kominfo, kami ingatkan soal keamanan data pribadi warga dalam aplikasi peduli lindungi. Pak Menteri dengan semangat meyakinkan soal pengelolaan keamanan data yang hebat dan dijamin tidak bocor, dalam eHac.

Kenyataannya bobol lagi, ini kan konyol. Sementara selama ini kasus kebocoran data yang sudah pernah terjadi, tidak jelas penanganannya seakan menguap dan dilupakan. Jika seperti ini terus yang terjadi, masyarakat sangat dirugikan," ungkap Sukamta.

Menurut Sukamta, pemerintah bertanggung jawab penuh dengan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola. Mestinya disiapkan secara matang sistem perlingkungannya. Ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi tetapi boleh jadi berefek pada keamanan

"Maraknya kasus penipuan online, saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat. Artinya keamanan data pribadi yang kuat akan menutup banyak celah kejahatan cyber."

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk melakukan proses audit terhadap semua sistem penyimpanan data serta mendorong kerjasama terpadu antar pengelola data maupun ahli TI supaya kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

"Jangan sampai ada pembiaran soal keamanan data. Kominfo dan BSSN harus proaktif melakukan audit sistem keamanan data secara berkala. Di Indonesia ada banyak ahli TI yang mestinya bisa dilibatkan untuk memperkuat pengamanan data," ujar Sukamta.

Pada akhirnya Sukamta mengingatkan pemerintah pentingnya untuk segera disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"Pemerintah bertanggung jawab penuh dengan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola. Mestinya disiapkan secara matang sistem perlingkungannya. Ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi tetapi boleh jadi berefek pada keamanan. Maraknya kasus penipuan online, saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat. Artinya keamanan data pribadi yang kuat akan menutup banyak celah kejahatan cyber"

# Kunker ke Kepri, Aus Hidayat Nur Kedaulatan NKRI **Harus Dijaga** dengan UU Kokoh dan Pemerintah Kuat

**KUTIPAN**

"UU Landas Kontinen yang dalam proses revisi ini diharapkan bisa menjaga kedaulatan NKRI dan potensi kekayaan bawah laut. Sehingga seperti perikanan di wilayah batas kontinen terjaga untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkapnya disela kunjungan ke Kantor Gubernur Kepri (06/09/2021).

Kepulauan Riau (08/09) — Dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Riau bersama rombongan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Landas Kontinen, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menegaskan bahwa wilayah NKRI perlu dijaga bukan sekadar dengan semangat nasionalisme namun juga dengan landasan hukum yang kokoh.

"UU Landas Kontinen yang dalam proses revisi ini diharapkan bisa menjaga

kedaulatan NKRI dan potensi kekayaan bawah laut. Sehingga seperti perikanan di wilayah batas kontinen terjaga untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkapnya disela kunjungan ke Kantor Gubernur Kepri (06/09/2021).

Rombongan yang diterima oleh Wakil Gubernur Kepri ini, melakukan lawatan untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah yang memiliki batas wilayah dengan negara lain.

"Kepri ini termasuk wilayah

kepulauan, bahkan 96 persen wilayahnya merupakan perairan. Berbatasan dengan negara lain. Jadi kita berharap dari kunjungan ini bisa mendapatkan informasi-informasi baru terkait kebutuhan di batas wilayah NKRI," lanjutnya.

Namun begitu, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan, perlunya memperkuat performance Pemerintah. Sehingga UU yang dihasilkan pada akhirnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang kuat.

"Revisi UU ini mungkin juga akan melahirkan polemik perbatasan. Sehingga kita juga berharap pemerintah harus bisa tampil dengan kuat bila nanti muncul sengketa batas. Jangan hanya kencang menggaungkan cinta NKRI, tapi harus benar-benar berani menjaga batas-batas kedaulatan NKRI," tutup Anggota Komisi II yang biasa disapa Kyai Aus ini.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi III DPR RI

"Revisi UU ini mungkin juga akan melahirkan polemik perbatasan. Sehingga kita juga berharap pemerintah harus bisa tampil dengan kuat bila nanti muncul sengketa batas. Jangan hanya kencang menggaungkan cinta NKRI, tapi harus benar-benar berani menjaga batas-batas kedaulatan NKRI"



# BOOSTER VAKSIN HANYA UNTUK NAKES

Fraksi PKS menyanggah penggunaan booster vaksin tidak tepat sasaran. Padahal dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 disebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes. Ramai diberitakan sejumlah pejabat non-nakes mengaku sudah disuntik booster vaksin ini.



**Mulyanto:**  
**Fokus Vaksinasi  
Masyarakat Umum**

"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil,"



**Mardani :**  
**Semua harus  
ikut aturan**

"Semua harus ikut aturan, dosis ketiga adalah untuk tenaga kesehatan. Mestinya kita malu mendapatkan yang ketiga sementara masih banyak rakyat Indonesia di beberapa tempat belum dapat vaksin pertama. Pak @Jokowi perlu menegaskan aturan dengan tegas."



**Netty: Harus  
Segera Lakukan  
Evaluasi**

"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah,

## Habib Rizieq Batal Bebas, **Nasir Djamil: Ada Kesan Kuat Hakim Diintervensi Kekuasaan**

### KUTIPAN

Jakarta (30/08) — Mantan Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab batal bebas dari hukuman yang menjerat-nya atas kasus kerumunan yang terjadi tahun lalu saat kepulangannya dari Saudi.

Banyak kalangan yang kecewa dengan keputusan hakim tsb.

Merespns hal itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil langsung mengingatkan majelis hakim yang mengadili Habib Rizieq Shihab (HRS).

Kata politisi PKS itu, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam pandangan Nasir Djamil, sudah selayaknya Habib Rizieq dibebaskan.

"Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil, karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung," kepada Kantor Berita Politik

RMOL, Minggu (29/8).

Legislator asal Aceh ini menambahkan, dalam kasus yang menjerat HRS idealnya hakim wajib menggali.

Selain itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa hukum dasarnta bukan pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa.

"Terus terang saya miris mengikuti pemberitaan persidangan HRS. Ada kesan yang sangat kuat di tengah masyarakat bahwa hakim yang mengadili HRS seperti nya diintervensi pihak-pihak lain yang berpengaruh," tandasnya.



### **H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Daipul Nangroe Aceh Darussalam II

"Sudah selayaknya Habib Rizieq dibebaskan. Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil, karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung. dalam kasus yang menjerat HRS idealnya hakim wajib menggali. Selain itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang di hidup di dalam masyarakat.

# Rapat Bersama Mahkamah Agung, Habib Aboe Berikan Beberapa Catatan Terkait Penggunaan E-Court

## KUTIPAN

Jakarta (30/08) --- Pimpinan DPR dan Komisi III melaksanakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung, Senin, (30/08). Kegiatan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

Pada kegiatan ini, dilakukan diskusi mengenai isu terkait pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Utamanya berkenaan dengan tugas ditengah pandemi covid-19, seperti kendala dan hambatan pelaksanaan e-court di Mahkamah Agung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan jika dilihat pada tahun 2019, perkara yang teregister di Mahkamah Agung mencapai 20 ribuan perkara.

Tentunya, lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboe, begitu memasuki masa pandemi Covid-19 akan lebih banyak perkara yang kemudian menggunakan fasilitas e-court.

Tentunya ini harus diantisipasi dengan baik Mahkamah Agung

"Kami mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah meluncurkan fasilitas e court ini pada 19 Agustus 2019. Artinya, sebelum ada pandemi Mahkamah Agung telah menyiapkan infrastruktur e court ini dengan baik," pungkas Sekjen DPP PKS ini.

Sehingga, imbuhnya, ketika pada saat pandemi ada tuntutan untuk menggunakan fasilitas internet dalam administrasi persidangan, Mahkamah Agung telah memiliki persiapan yang baik.

"Namun tentu ini perlu dievaluasi, oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengingatkan hal terkait penguatan layanan ecourt,

seperti kemampuan cloud penyimpan data yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, apakah ini sudah memadai dengan banyaknya perkara yang masuk di saat pandemi ini," terang Bendahara FPKS DPR RI ini.

Kemudian, lanjutnya, juga kita ingatkan bagaimana tingkat keamanan datanya. Termasuk juga Siapa yang menyimpan dan dimana disimpannya, Tentu ini perlu diperhatikan.

"Termasuk pengarsipan dan pemeliharaan data tersebut, Karena semakin lama akan semakin banyak data yang harus diarsipkan, dan tentunya memerlukan biaya juga, ini semu harus direncanakan dengan baik oleh Mahkamah Agung," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Jika dilihat pada tahun 2019, perkara yang teregister di Mahkamah Agung mencapai 20 ribuan perkara. Tentunya, begitu memasuki masa pandemi Covid-19 akan lebih banyak perkara yang kemudian menggunakan fasilitas e-court. Tentunya ini harus diantisipasi dengan baik Mahkamah Agung"

# Dinilai Tak Efektif Awasi Lapas Terbakar di Tangerang, Politisi PKS **Desak** Pejabat Terkait Mundur

**KUTIPAN**

Jakarta (10/09) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dimiyati Natakusumah menyoroti kasus terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kota Tangerang yang menyebabkan 41 narapidana meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka, Rabu, (08/09/2021).

Menurut Dimiyati, kebakaran yang terjadi dihari tersebut adalah bukti tidak profesionalnya kinerja petugas dalam mengawasi dan mengelola lembaga pemasyarakatan.

"Ini kita melihat kurang profesional dalam mengelola rumah tahanan. Jadi kalau kita melihat kejadian seperti ini kan sudah berkali-kali. Dari mulai rekrutmen, penempatan dan juga manajemen yang ada. Kesalahan kan bisa jadi dari yang bawah atau juga dari yang atas. Jadi saya melihat seperti

ini berulang-ulang dan bosan ini kejadian lagi", terang Anggota DPR dari Dapil Banten I dalam acara PKS Legislative Corner yang diadakan Fraksi PKS DPR RI.

Dimiyati menegaskan kejadian kebakaran Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini harus diusut tuntas dan dicari apa penyebabnya apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

"Tapi diusut dengan benar. Kalau di Luar Negeri baik di Eropa maupun di Amerika, jika terjadi seperti ini pemimpinnya mengundurkan diri. Kalau di

kita bisa cari alasan seperti over kapasitas yang menurut saya sudah klise ya, tinggal bagaimana membuat peraturan yang jelas di lapangan seperti 'restoratif justice' atau penempatan yang tepat," urai Dimiyati.

Yang lebih miris lagi, imbuh Dimiyati, kejadian terjadi pada sel tahanan kasus narkoba yang menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi para korban jiwa.

"Polisi harus mengusut tuntas ini, ada apa dibalik kebakaran yang terjadi di tahanan yang mayoritas narkoba. Kita gak ada yang tau apakah ada tahanan yang kabur atau ada tuker tahanan. Ini harus diusut tuntas," tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

“Polisi harus mengusut tuntas ini, ada apa dibalik kebakaran yang terjadi di tahanan yang mayoritas narkoba. Kita gak ada yang tau apakah ada tahanan yang kabur atau ada tuker tahanan. Ini harus diusut tuntas,”

# BERTEMU PERWAKILAN ULAMA DAN HABAIB

Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Sekjen DPP PKS yang juga Bendahara Umum FPKS, Aboebakar Al-Habsy, Anggota FPKS DPR RI, Almuzzammil Yusuf dan Wakil Ketua PPP Amir Uskara dan Sekjen PPP Arwani Thomafi bertemu perwakilan Ulama dan Habaib yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (07/09).



# Terbakarnya Kapal Hentri GT 195, **Aleg PKS: Segera Selamatkan Belasan ABK!**

**KUTIPAN**

Jakarta (09/09) — Belasan warga Sukabumi menjadi korban musibah terbakarnya kapal KM Hentri GT 195 di perairan Maluku Utara. Menurut data yang diperoleh belasan nelayan (ABK) asal Sukabumi tersebut berangkat ke Muara Angke, Jakarta pada 15 Agustus dan pada 18 Agustus mulai berangkat ke perairan Merauke menggunakan KM Hentri GT 195.

Namun naas pada 3 September kapal tersebut terbakar di perairan Maluku Utara.

Anggota komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil kota dan kabupaten Sukabumi, Slamet meminta agar semua pihak bergerak cepat untuk melakukan kontak dengan pihak-pihak terkait demi keselamatan para Anak Buah Kapal (ABK).

"Saya akan segera menghubungi pemerintah daerah Sukabumi untuk bersamasama mencari tahu dan memberikan bantuan kepada warga Sukabumi yang menjadi korban kapal ikan tersebut," ujarnya, saat dihubungi, Kamis (09/09). Slamet juga mengaku

sudah berkoordinasi dengan Dirjen Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta struktur dan Aleg PKS dari Dapil Maluku.

Berdasarkan data terbakarnya kapal ikan tersebut terjadi pada 3 September 2021, artinya peristiwa tersebut sudah terjadi seminggu yang lalu. Sedangkan info kejadian tersebut baru mencuat pada 7 September yang bersumber dari salah satu ABK kapal KM Hentri 195. Korban yang selamat sementara baru 5 orang termasuk dirinya.

Mereka yang selamat saat ini berada di kabupaten Maluku Tenggara, kecamatan Kei Kecil

Barat, desa Tanimbar Kei. Hingga berita ini diturunkan korban selamat bertambah menjadi 10 orang.

Menurut Slamet, saat ini pihaknya belum mengetahui kondisi pasti dan bagaimana keadaan seluruh ABK asal Sukabumi. Ia juga menegaskan akan mengawal seluruh proses yang terkait dengan perlindungan hak-hak para ABK termasuk akan mencari tahu kondisi terkini para korban.

"Saya selaku wakil rakyat Sukabumi akan berikhtiar secara maksimal untuk bisa membantu dengan mengerahkan kemampuan yang ada termasuk jejaring yang saya miliki untuk mengawal proses pencarian maupun perlindungan hak-hak para nelayan tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, diketahui Belasan warga kabupaten Sukabumi yang menjadi ABK kapal ikan tersebut, berdasarkan data sementara yang berasal dari Cibadak (13 orang), Jampang tengah (5 orang) dan Caringin (1 orang).

Dalam Daftar nama ABK dari KM Hentri GT 195 yang didapatkan dari Basarna ada sejumlah nama dengan identitas Sukabumi.

**drh. H. SLAMET**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

"Saya selaku wakil rakyat Sukabumi akan berikhtiar secara maksimal untuk bisa membantu dengan mengerahkan kemampuan yang ada termasuk jejaring yang saya miliki untuk mengawal proses pencarian maupun perlindungan hak-hak para nelayan tersebut"

# Uluputty : Hasil Perikanan Maluku **Tidak Sepadan** dengan Penerimaan Daerah

## KUTIPAN

Ambon (10/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mengungkapkan kontribusi Maluku sebagai daerah penghasil ikan selama ini tidak menguntungkan bagi daerah, terutama bagi kesejahteraan nelayan di Maluku.

“Meskipun Maluku selalu memberikan kontribusi besar kepada negara melalui sektor perikanan, namun Pemerintah Pusat memberikan APBD Maluku hanya sekitar Rp. 2,8 triliun saja. Anggaran ini dipastikan tak mampu mengimbangi kebutuhan nelayan di Maluku,” kata politisi PKS Maluku ini saat berbicara pada Bimtek dan Pelatihan Perikanan Tangkap di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Negeri Tulehu, Ambon, Jumat (03/09/2021).

Bimtek itu merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja Komisi IV, yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Negeri Tulehu, Ambon.

Uluputty mengaku, sebagai

rakyat Maluku di Senayan, dirinya memastikan akan terus berupaya menyampaikan hajat masyarakat saat rapat komisi dengan mitra kerja, bahkan dalam sidang Paripurna Istimewa sekalipun. Dampak dari upaya ini, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan nelayan.

“Pastinya kami akan berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Nelayan) di Maluku,” tandasnya.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Maluku itu menjelaskan, di tahun 1968 Indonesia pernah bekerjasama dengan Jepang (Banda Sea Agreement) untuk mengeksploitasi ikan tuna di laut Banda Maluku. Namun, hasil dari kerjasama tersebut tidak meningkatkan sektor pembangunan

infrastruktur sarana dan prasarana perikanan Maluku kala itu.

“Saat ini kondisi perikanan Maluku pun tak jauh berbeda dengan di tahun 1968. Padahal, perairan Maluku memberikan sumbangan ikan ke negara sebesar 26 hingga 30 persen untuk stok ikan Nasional. Lalu hasil dari sumbangan itu pun masuk dalam APBN,” urainya.

Anggota DPR RI dapil Maluku ini juga meminta Pemprov Maluku dalam pengembangan sektor perikanan melalui Program Lumbung Ikan Nasional (LIN), harus dilakukan dengan merangkul dan melibatkan nelayan lokal dan masyarakat pesisir. Tujuannya agar pemerintah mengetahui lalu mendalamikan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah pusat, kata Uluputty, juga harus bekerjasama dengan Pemprov Maluku dalam memastikan partisipasi dan pelibatan masyarakat, dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan, karena merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis.



**SAADIAH ULUPUTTY, S.T.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

“Pemerintah pusat harus bekerjasama dengan Pemprov Maluku dalam memastikan partisipasi dan pelibatan masyarakat, dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan, karena merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis.

“Saya berharap pemerintah harus mencatat dan memastikan hak perlindungan masyarakat nelayan lokal, termasuk perlindungan ekosistem dan keberlanjutannya,” pungkasnya.

Kegiatan Bimtek ini juga dihadiri secara virtual oleh Plt. Kepala Badan Riset dan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Kustiantoro, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Lily Aprilya Pregiwati, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malteng La Masiada dan, Kepala Balai Ambon Abu Bakar

# Anggota FPKS: Pemerintah **Tidak Sejalan** dalam Impor Beras

**KUTIPAN**

Padang (30/08) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan, belakangan ini secara diam-diam beras impor masuk ke Indonesia.

Akibatnya, kata Hermanto, petani dalam negeri dirugikan. Hermanto pun meminta Pemerintah terbuka menjelaskan hal tersebut agar rakyat tahu apa terjadi.

"Sejauh ini Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras di tahun 2021 ini. Tetapi kejadian di lapangan, secara diam-diam beras impor masuk ke Indonesia," ujar Hermanto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Bulog, Senin (30/08/2021).

Impor beras tersebut, kata Hermanto, bisa terjadi karena menteri-menteri terkait tidak seirama dalam mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi. "Satu sisi, Menteri Pertanian dan Dirut Bulog mengatakan terjadi

surplus beras dari hasil panen petani dalam negeri sehingga cukup untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Namun disisi lain, data BPS menunjukkan tahun 2021 ini terjadi impor beras", tutur legislator dari FPKS DPR ini.

BPS melaporkan, secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2021, Indonesia sudah melakukan impor beras sebanyak 242,9 ribu ton dengan nilai mencapai US\$ 110,2 juta. Realisasi impor beras pada Januari-Juli 2021 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi impor beras pada periode yang sama tahun lalu, baik secara volume dan nilai, di mana pada tahun lalu volumenya mencapai 185 ribu ton dengan nilai sebesar US\$ 108,13 juta.

"Ini berarti ada

Kementerian lain yang memberi izin impor beras secara diam-diam, sehingga beras tersebut beredar di pasar dalam negeri," ucap Hermanto.

Hermanto mendesak agar Pemerintah menyelesaikan ketidakharmonisan hubungan antar Kementerian/Lembaga yang terkait impor beras dalam rapat terbatas sehubungan tidak sinkronnya antara kebijakan pembatasan dan implementasi impor beras.

"Apalagi sekarang sudah terbentuk Badan Pangan Nasional. Gonjang ganjing masalah impor beras dan cadangan beras yang berasal dari impor yang umurnya sudah tiga tahun, mestinya sudah dapat diatasi," papar Hermanto.

Hermanto berharap, kebijakan pangan menguntungkan petani dalam negeri.

"Caranya: batasi impor, tingkatkan kualitas beras petani dan serap beras petani saat panen raya untuk stabilisasi harga beras dan kesejahteraan petani," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**  
Anggota Komisi IV DPR RI

'Impor beras tersebut bisa terjadi karena menteri-menteri terkait tidak seirama dalam mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi. "Satu sisi, Menteri Pertanian dan Dirut Bulog mengatakan terjadi surplus beras dari hasil panen petani dalam negeri sehingga cukup untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Namun disisi lain, data BPS menunjukkan tahun 2021 ini terjadi impor beras",

# Harga Cabai Anjlok, Aleg PKS Desak Pemerintah Lakukan Sebaran Produksi dan Perbaiki Industri

## KUTIPAN

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan ikut prihatin, dengan anjloknya harga cabai di pasaran dimana banyak petani gelisah bahkan marah karena harga cabai yang merosot tajam.

Menurut Johan, melonjaknya harga cabai harus segera disikapi pemerintah, agar harga segera stabil pada saat panen cabai.

"Saya minta pemerintah segera stabilkan harga cabai karena jika dilihat dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional maka telah terjadi kemerosotan harga cabai besar sebanyak 3,38% dan cabai rawit merah juga merosot 1,83% demikian juga untuk cabai merah kriting harga turun sebesar 2,77%", papar Johan sembari merasakan beban berat yang dihadapi petani ketika harga anjlok pada saat panen.

Politisi PKS ini mendesak pemerintah menyiapkan solusi

konkret untuk stabilisasi harga cabai serta membuat kebijakan agar harga cabai bisa menguntungkan petani.

"Saya berharap ada desain strategi supaya pemerintah melakukan sebaran produksi cabai dan memperbaiki industri cabai nasional karena terjadinya disparitas harga cabai antar daerah disebabkan karena pusat produksi cabai terkonsentrasi di Pulau Jawa dan saya minta segera perbaiki industri cabai agar dinamika produksi dan volatilitas harga cabai dapat terkendali," ujar Johan.

Legislator Senayan dari Pulau Sumbawa ini menilai sampai saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga cabai

yang bisa menguntungkan petani.

"Untuk itu, saya mendorong pemerintah agar membantu petani dalam menghadapi berbagai kesulitan karena menurutnya para petani selalu mengalami kerugian dalam berusaha tani cabai dan selalu mengalami harga jual yang rendah, serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) dan modal yang terbatas," ungkapnya.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini melihat bahwa pemerintah mesti membantu para petani dalam hal pemasaran karena menurutnya rantai pasok komoditi cabai yang terlalu panjang, yang hal ini juga berakibat tingginya kerusakan yang menyebabkan harga sangat fluktuatif.

"Salah satu cara mengembangkan industri cabai, pemerintah mesti aktif menghubungkan kemitraan petani dengan perusahaan pengolah cabai sehingga harga bisa stabil, kemitraan ini harus dikembangkan dengan model berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi



## H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya usulkan pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga dasar cabai yang wajar, yang bisa menguntungkan petani dan tidak memberatkan konsumen, penentuan harga dasar ini harus mempertimbangkan break event point (BEP) cabai secara nasional serta bersikap tegas untuk tidak impor"

yang bisa menguntungkan para petani," tutur Johan.

Johan menandatangani agar pemerintah bersikap tegas untuk menstabilkan harga cabai sebab merosotnya harga cabai

selalu terjadi setiap tahun dan hal ini selalu merugikan petani produsen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RDP dengan Bulog,

# Aleg PKS: Bentuk Lembaga Khusus Operator Badan Pangan Nasional yang Tak Cari Untung

**KUTIPAN**

Jakarta (31/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bulog menyampaikan, Peraturan Presiden (Perpres) No 66/2021 yang terbit 29 Juli 2021 mesti di ikuti pada transformasi lembaga operatornya.

Operator BPN (Badan Pangan Nasional), mesti menjalankan fungsinya tanpa melibatkan kepentingan mencari keuntungan. Jadi ketika Bulog menjadi operator BPN, kata Akmal, mestinya BULOG menjadi lembaga seperti sebelum menjadi Perum di bawah BUMN.

"Fungsi Bulog yang saat ini dualisme, menyalurkan PSO dan Mencari Keuntungan menyatu dalam satu lembaga. Persoalan ini akan mirip dengan Pupuk Subsidi, dimana PT PI selain memproduksi pupuk dengan mencari keuntungan penuh juga memproduksi Pupuk

subsidi yang berasal dari APBN. Akibatnya, berbagai persoalan yang ada, hingga kini tak pernah ada solusinya", tutur Akmal.

Secara skema, lanjut Akmal, keberadaan BPN akan mengubah skema penugasan kepada Perum Bulog menjadi satu arah dan tidak melibatkan banyak instansi pemerintah.

"Tapi posisi Bulog yang tetap berkoordinasi dengan BUMN akan tetap menjadi persoalan di kemudian hari," ungkapnya.

Politisi PKS ini berharap, Sembilan jenis pangan yang

menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai dimasa yang akan datang dapat terkendali mulai dari distribusi hingga tata niaganya.

"Dan yang paling penting, setelah adanya BPN, jangan ada lagi polemik Impor yang nantinya menjadi petani bergejolak. Selama petani terakomodir dan ternyata masih ada kekurangan, saya kira impor bukan hal yang tabu", tegas Akmal.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini mempertanyakan, kemungkinan BULOG melakukan pilihan, mau fokus menjadi badan yang mencari keuntungan, atau badan yang menjadi tangan pemerintah untuk melakukan kinerja PSO.

"Selama BULOG masih dualisme dalam menjalankan amanat kerjanya, saya yakin, persoalan pangan untuk melayani masyarakat akan terbentur kepentingan yang



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

**"Selama BULOG masih dualisme dalam menjalankan amanat kerjanya, saya yakin, persoalan pangan untuk melayani masyarakat akan terbentur kepentingan yang tidak akan pernah selesai"**

tidak akan pernah selesai. Jadi, sebaiknya lembaga yang cari keuntungan, serahkan saja pada holding pangan di bawah RNI dimana mereka melalui

BUMN yang lain dapat melakukan fokus kerja bisnis pangan milik pemerintah", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# PEMERINTAH BELUM MAMPU PENUHI TARGET APBN TAHUN 2020

## PKS Mendesak Pemerintah Serius Dalam Targetkan Pengelolaan APBN

■ Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah masih belum mampu mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020.

■ Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 :  
Target                      Realisasi

**5,3%**      →      **-2,07%**

■ Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat.

↓ Lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan

↓ Penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*middle income*)

↓ Pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59,1 juta per penduduk (US\$4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56,9 juta per penduduk (US\$3.911,7 per penduduk) pada 2020.



# Penggunaan Public Service Obligation (PSO) untuk Kapal Isoter, Anggota FPKS: Berpotensi Langgar Aturan

## KUTIPAN

Jakarta (31/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mempertanyakan pembiayaan operasional Kapal Public Service Obligation (PSO) penumpang milik PT Pelni untuk kapal isolasi terpusat (isoter) terapung untuk pasien Covid-19.

Sigit menilai ada potensi pelanggaran peraturan jika anggaran PSO angkutan laut digunakan untuk isoter terapung.

Hal itu disampaikan Sigit menyusul penempatan enam kapal PSO Penumpang milik PT Pelni sebagai tempat isolasi terpusat pasien covid 19 di enam provinsi.

Menurut Sigit, sesuai dengan UU No. 17/2009 tentang Pelayaran yang sudah direvisi menjadi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, PSO sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk memperlancar konektivitas di daerah tertinggal dan terpencil

dengan angkutan perintis.

"Dalam pasal 24 UU Pelayaran, pemerintah wajib memberikan subsidi bentuk pelayanan publik untuk angkutan perintis dengan rute wilayah tertinggal dan terpencil. Kalau anggaran PSO ini digunakan untuk membiayai operasional kapal isoter terapung bisa jadi akan berpotensi melanggar peraturan. Mohon pemerintah berhati-hati dan taat aturan dalam menggunakan PSO. Jangan sampai nanti menjadi temuan BPK," Kata Sigit.

Selain berpotensi melanggar UU, pengalihan PSO angkutan laut untuk program isoter

juga berpotensi melanggar peraturan lainnya seperti PP 20/2010 Tentang Angkutan Perairan, PP No. 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Permenhub No. 10/2021 tentang Komponen Biaya Pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut.

"Pasal 75 PP 20/2010 (pasal ini dinyatakan tetap dan tidak cabut dalam PP 31/2021) menegaskan kembali bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional untuk melayani daerah tertinggal dan terpencil dengan mendapat kompensasi berupa PSO. Artinya, harus ada rute yang dilayani untuk bisa mendapatkan PSO. Kalau digunakan untuk isoter, rute apa yang dilalui karena posisi kapalnya portstay? Dan sesuai dengan Permenhub No. 10/2021, pendapatan yang diterima penyelenggara PSO diberikan berdasarkan dari penjualan tiket ekonomi. Kalau melayani isoter, bagaimana nanti pembuktian tiket



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

“Soal PSO ini pemerintah harus transparan. Setiap tahun anggaran PSO naik, tapi selama 2 tahun ini penumpang anjlok. Kami paham selama PPKM penumpang anjlok. Tapi jangan sampai, hanya karena mengejar penyerapan dana PSO pemerintah sampai membuat program yang berpotensi bermasalah dan melanggar aturan”

perjalanannya," Kata Sigit.

Sigit yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan taat aturan dalam menggunakan PSO mengingat pada tahun

2020 BPK juga sudah memberikan catatan untuk penyelenggaraan PSO yang diterima oleh PT Pelni.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Rencana Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi di Moda Transportasi, Aleg PKS: Harus Efektif dan Efisien

## KUTIPAN

Tasikmalaya (28/08) — Aplikasi Peduli Lindungi akan diterapkan di seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian, Sabtu (28/8/2021).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan bahwa aplikasi ini menjadi syarat perjalanan.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, titik kumpul moda transportasi publik, se-perti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara menjadi salah satu bagian penting dari filtrasi untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Moda transportasi publik menjadi salah satu sektor yang penting untuk mengatur mobilitas di masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini diharapkan dapat mengelola mobilitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Politisi PKS.

Toriq menyebutkan bahwa menurut Kemenhub aplikasi

digital ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya bisa membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di titik kumpul transportasi secara digital.

“Proses validasi secara digital, dianggap lebih aman, cepat, mudah dan sederhana, serta meminimalkan kontak fisik karena tidak harus membawa dokumen kertas hasil tes Covid-19 atau kartu vaksinasi. Juga, lebih aman dari pemalsuan hasil tes swab,” sebutnya.

Namun bukan berarti aplikasi ini tidak memiliki kekurangan tambah Toriq. Kinerja aplikasi PeduliLindungi masih belum memberikan layanan yang optimal. Hal itu diketahui dari banyaknya masyarakat yang mengeluh soal aplikasi PeduliLindungi.

“Salah satu permasalahan

utama yang kerap ditemui adalah tidak munculnya sertifikat vaksin, pada pengguna yang sudah divaksin. Mengalami error saat pengguna hendak melakukan scan barcode untuk syarat keluar dari pusat perbelanjaan. Hal ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Toriq pun menyarankan pemerintah pada umumnya dan Kemenhub secara khusus agar segera memperbaiki masalah yang ada. Pasalnya, jika aplikasi PeduliLindungi masih juga error maka akan merugikan masyarakat yang menggunakannya.

“Kemudian hendaknya seluruh operator sarana dan prasarana transportasi harus terus mempersiapkan diri, baik secara sistem maupun prosedur, supaya penerapan aplikasi PeduliLindungi ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, pada awal penerapan aplikasi PeduliLindungi di titik kumpul transportasi publik, Toriq meminta para operator untuk membantu masyarakat pengguna jasa transportasi yang masih belum mengetahui pemberlakuan aturan ini dengan cara yang baik dan simpatik.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

“Titik kumpul moda transportasi publik, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara menjadi salah satu bagian penting dari filtrasi untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Moda transportasi publik menjadi salah satu sektor yang penting untuk mengatur mobilitas di masa pandemi Covid-19. Oleh karenanya dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini diharapkan dapat mengelola mobilitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien,”

# Anggota FPKS: **Kebocoran Data** Ancam Pertumbuhan Ekonomi Digital

**KUTIPAN**

Jakarta (01/09) — Kasus kebocoran data kembali terjadi, setelah Juli 2021 lalu terjadi kebocoran data 297 juta orang milik BPJS Kesehatan, diduga terjadi kebocoran data publik yang terekam dalam aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak prihatin dengan pencurian data berulang seperti itu karena mengancam masa depan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

"Ditengah boomingnya pemanfaatan e-commerce di Indonesia, terlebih lagi Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian e-commerce Asean. Maka lemahnya keamanan data di Indonesia sangat merugikan konsumen dan mengancam masa depan perdagangan digital di Indonesia," beber Amin.

Hasil survey We Are Social pada April 2021 menyebutkan, persentase penggunaan e-commerce Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.

"Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia

memakai layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu menyayangkan lambannya pemerintah dalam mengambil langkah signifikan untuk menjamin data kependudukan.

"Dalam kasus kebocoran data eHAC, BPJS Kesehatan, maupun kebocoran data sebelumnya, terungkap penyebab mudahnya pencurian data akibat kelalaian developer/vendor maupun lembaga atau perusahaan sebagai wali data yang terlibat dalam layanan aplikasi tersebut," pungkask Amin.

Merujuk pada penjelasan Noam Rotem dan Ran Locar

peneliti situs peneliti siber, VPN Mentor, terungkap bahwa eHAC tidak memiliki protokol keamanan data yang andal. Akibatnya, sekitar 1,3 juta data pribadi pengguna eHAC di server mudah terekspose dan digunakan oleh pihak lain.

Kelengahan dari developer ini bisa mengakibatkan pemilih akun e-HAC bisa menjadi target profiling dan penipuan dengan modus covid terutama, seperti telemedicine palsu maupun semacamnya. Kemesken sebagai walidata juga seharusnya mengamankan server dan protokol akses ke system yang digunakan agar tidak sembarangan orang bisa masuk.

Lemahnya aturan hukum, imbuhs Amin, menyebabkan kelalaian pengelola sehingga terdapat kelemahan pada ketiadaan authentication sistem. Deteksi kelemahan ataupun kerawanan juga bisa dilakukan secara dini jika dilakukan pengecekan secara berkala.

"Ada masalah keamanan data serius yang dikumpulkan oleh lembaga publik. Krisis perlindungan data pribadi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah," tegas Amin.

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Ada beberapa pasal krusial dalam RUU PDP, diantaranya kelalaian oleh pengelola data yang menyebabkan kebocoran harus dikenakan sanksi hukum tegas. Dan kelemahan dalam sistem keamanan data individu juga harus dianggap sebagai kelalaian"

Karena itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI itu mendesak agar RUU Perlindungan Data Pribadi bisa disahkan dalam tahun ini juga.

"Jangan sampai krisis keamanan data pribadi

merusak target pemerintah untuk menjadikan ekonomi digital menjadi salah satu motor pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: Demi Bangkitnya Perekonomian, Pemerintah Harus Jaga Momentum Penurunan Covid-19

**KUTIPAN**

Jakarta (01/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman mengingatkan Pemerintah untuk bisa menjaga kondisi penurunan positif Covid-19 secara berkesinambungan dan harus dimaknai sebagai hasil dari kedisiplinan menjaga Protokol Kesehatan.

Menurut Mahfudz, perekonomian sudah mulai menggeliat, pihaknya berharap secara perlahan situasi akan membaik dengan Normal Baru," demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Masyarakat, imbuh Mahfudz, patut bersyukur, saat ini situasi sudah semakin membaik, penurunan positif Covid-19 yang dibarengi dengan mulai Bergeraknya sektor perekonomian.

"Penghargaan kepada seluruh masyarakat, yang mampu menjalankan Prokes dalam setiap aktifitasnya. Kita tidak boleh lalai dan lengah, kedisiplinan menjadi hal yang

wajib," ucap Mahfudz.

Bendahara Umum DPP PKS ini selanjutnya menyampaikan bahwa keadaan sulit pasca libur lebaran kemarin, jangan lagi ditemui.

"Semua merasakan kesulitan yang sangat besar. Semua sektor nyaris kolaps, pengangguran meningkat tajam. Sektor UMKM pun terdampak berat, pembatasan waktu berdagang membuat mereka kesulitan berjualan," ujarnya.

Tidak jarang, lanjut Mahfudz, terjadi konflik antara pedagang dengan petugas. Ini tentu membuat prihatin, karena hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah

lebih intens dan humanis dalam menyosialisasikan kebijakan.

"Bagaimanapun kita merasakan bantuan untuk masyarakat dari Pemerintah dirasakan masih minim, dalam upaya mengurangi dampak pandemi ini. Namun kita juga sadar kemampuan Anggaran negara memang sedang sangat terbatas," tandasnya.

Jika perekonomian semakin membaik, kata Mahfudz, Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk bantuan kepada masyarakat.

"Saat ini kita bersama harus mampu menjaga momentum yang sudah baik ini. Penurunan Positif Covid-19, tingkat rawat inap karena Covid-19 semakin menurun tajam, gencarnya Vaksinasi dan pelonggaran untuk berusaha di beragam sektor tentu cukup menggembirakan," ungkapnya.

"Disiplin Prokes harus dilaksanakan dan perlu ketegasan terhadap pelanggaran. Itu perlu dilakukan semaksimal untuk kebaikan Bersama," imbuh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

Saat ini kita bersama harus mampu menjaga momentum yang sudah baik ini. Penurunan Positif Covid-19, tingkat rawat inap karena Covid-19 semakin menurun tajam, gencarnya Vaksinasi dan pelonggaran untuk berusaha di beragam sektor tentu cukup menggembirakan

Bekasi ini.

Pemerintah, ujar Mahfudz, dengan segenap perangkatnya harus mampu menjaga situasi yang kondusif ini, komunikasi dan koordinasi antar instansi, baik di pusat dan di daerah harus terus ditingkatkan.

"Keadaan yang sudah baik ini harus dijaga, supaya perekonomian kita semakin meningkat ke arah yang positif, dan berujung pada penciptaan lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran harus bisa diturunkan," tegas Mahfudz

# Bersama BUMN, Rafli Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Ternak dan Budidaya Perikanan di Aceh

## KUTIPAN

Banda Aceh (28/08) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli, memfasilitasi Kelompok Ternak Penggemukan Sapi dan Budidaya Perikanan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

Pertemuan berlangsung di kawasan Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 28 Agustus 2021

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan Kehadirannya hanya memfasilitasi pertemuan antara Kelompok Ternak Penggemukan Sapi dan Budidaya Ikan, dengan sejumlah Perusahaan BUMN yang ada di Aceh. Untuk kemudian dilakukan pembinaan pengembangan usaha yang digagas oleh masyarakat kita.

"Ada dua kelompok masyarakat kita yang sudah presentasikan proyeksi rencana

usaha, yaitu Penggemukan Sapi, dari kelompok Meukon Droe Teuh. Sementara Budidaya Ikan Keramba Jaring Apun dan Resto dipaparkan oleh kelompok Donya Ekonomi Aceh," ungkap Rafli.

Rafli menambahkan bahwa setelah melihat di lapangan, masyarakat kita berpengalaman dan potensial.

"Sangat perlu perhatian dari banyak pihak, terutama Pemerintah untuk pengembangan usaha yang kemudian kita harap mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi dan tentu saja menciptakan lapangan kerja," ujar seniman kondang yang juga Politisi PKS asal Aceh.

Senada itu, Ketua Himpunan Forum Komunikasi BUMN, Feri Hariyan, mengatakan legalitas kelompok tani masyarakat akan dikaji.

"Untuk kemudian diteruskan ke atasan, Bantuan yang disalurkan kemungkinan dalam bentuk barang peralatan setelah verifikasi dan survey dinyatakan layak," ucap Feri usai merespon presentasi Kelompok Tani.

Hadir pada pertemuan, Anggota DPR RI Rafli, Ketua Forum Komunikasi BUMN, Feri Hariyan yang juga perwakilan (PT Pegadaian), Perwakilan sejumlah perusahaan BUMN lainnya, Tafaul Rijal (PT SBA), Soni (PT Pegadaian), dan Mulkan (PT Jasa Raharja), serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak dan budidaya perikanan tersebut.



## RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I

"Setelah melihat di lapangan, masyarakat kita berpengalaman dan potensial. Sangat perlu perhatian dari banyak pihak, terutama Pemerintah untuk pengembangan usaha yang kemudian kita harap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentu saja menciptakan lapangan kerja,



# Kemenperin Perlu Antisipasi Dua Potensi ‘Ledakan’ Pasca-Pandemi di Masyarakat

## KUTIPAN

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian RI, untuk mengantisipasi dua potensi ‘ledakan’ yang terjadi pascapandemi Covid-19 di masyarakat.

Karena itu, Tifatul berharap peningkatan program perindustrian yang dijalankan Kemenperin pada tahun 2022 dapat menjawab persoalan tersebut, untuk menghadirkan solusi di tengah masyarakat.

“Ada peningkatan industri ini penting dan program-program di Kemenperin itu mudah-mudahan sukses dan lancar. Karena ada prediksi yang menyebutkan bahwa pasca-Covid ini sangat berat, akan ada banyak hal yang terpendam yang tidak tertangani selama Covid-19 ini akan meledak begitu, atau terungkap,” jelas Tifatul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Potensi ledakan pertama, menurut Tifatul, adalah

melonjaknya penyakit yang tidak menular tapi sangat serius di masyarakat, seperti diabetes atau TBC. Beberapa penyakit ini, menurut Tifatul, tidak terpantau dengan baik karena energi masyarakat saat ini lebih fokus kepada penanganan pandemi Covid-19.

Karena itu, Tifatul meminta Ditjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin RI, harus serius menjalankan salah satu rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat.

“Bahan baku obat kita ini, menurut laporan yang saya baca, 96 persen itu impor. Sehingga apa-apa kita beli. Buat obat turun panas aja, kita beli bahan bakunya. Saya pikir kalau kita ingin menciptakan legacy,

terutama kepada Pak Agus (Menperin) saat menjadi menteri, kita bisa mendobrak ini. Negara India saja kalau menerima tawaran investasi dari negara lain, misalnya lima tahun setelahnya harus diserahkan untuk dikelola oleh orang India. Nah, ini 96 persen bahan baku obat di kita itu impor,” kritisi politisi Fraksi PKS ini.

Potensi ledakan kedua, sambung Tifatul, adalah yaitu terkait pengangguran. Menurut laporan yang diterimanya, angka pengangguran di Indonesia meningkat sampai di atas 30 persen. Meningkatnya angka pengangguran itu disebabkan karena pandemi yang berkepanjangan. Sehingga, banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemotongan gaji yang tidak cukup untuk hidup di kota dan bermigrasi ke kampung halaman.

“Karena itu, lapangan kerja kita dalam bentuk industri dan pengembangan lapangan kerja lainnya, harus ditingkatkan. Dua hal ini menyangkut masa depan generasi kita mendatang. Tapi, show must go on. Pak Menteri harus banyak berkorban banyak untuk bangsa dan negeri ini,” harapnya.



## Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Dapil Sumatera Utara I

“Bahan baku obat kita ini, menurut laporan yang saya baca, 96 persen itu impor. Sehingga apa-apa kita beli. Buat obat turun panas aja, kita beli bahan bakunya. Saya pikir kalau kita ingin menciptakan legacy, terutama kepada Pak Agus (Menperin) saat menjadi menteri, kita bisa mendobrak ini. Negara India saja kalau menerima tawaran investasi dari negara lain, misalnya lima tahun setelahnya harus diserahkan untuk dikelola oleh orang India. Nah, ini 96 persen bahan baku obat di kita itu impor,

# Terkait Anggaran Riset, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah **Ingkar Janji**

**KUTIPAN**

Jakarta (28/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menganggap Pemerintah ingkar janji terkait rencana konsolidasi anggaran riset di berbagai kementerian-lembaga Pemerintah.

Faktanya, kata Mulyanto, anggaran riset dalam RAPBN 2022 susut hingga sepertiganya.

Menurut Mulyanto, poster anggaran riset yang kecil ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengembangkan kegiatan riset tidak terbukti. Padahal sebelumnya, saat ingin membentuk BRIN, Pemerintah mengatakan anggaran riset akan dikonsolidasikan dalam satu lembaga. Tujuannya agar efisien dan efektif.

"Janji Pemerintah ingin mengkonsolidasikan anggaran riset melalui BRIN ternyata cuma janji kosong," kata Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN dan Kepala LPNK Ristek, (24/8/2021).

Mulyanto melihat, dalam APBN 2021 dan RAPBN 2022, ternyata anggaran riset semakin

merosot. Beberapa kementerian yang telah melikuidasi Balitbang-nya tidak punya lagi mata anggaran Riset dan Inovasi Iptek. Tersisa hanya 9 Kementerian yang mempunyai anggaran riset.

Namun naasnya, anggaran riset dari kementerian yang melikuidasi balitbang nya berganti dengan nomenklatur mata anggaran lain, anggaran riset tersebut tidak dipindah on top masuk menjadi anggaran riset di BRIN.

Akibatnya secara konsolidatif nasional, dengan terbentuknya BRIN, alih-alih anggaran riset nasional bertambah, yang terjadi justru sebaliknya, melorot.

"Dalam RUU APBN tahun 2022 ada 13 Kementerian dan 6 LPNK Ristek (termasuk BRIN), yang memiliki nomenklatur

anggaran Riset dan Inovasi Iptek dengan total anggaran hanya Rp 5 triliun," ungkapnya. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, menurut data Kemenristek, anggaran riset mencapai Rp 15 triliun dari total anggaran iptek (government budget on research and development/GBORD) yang sekitar 36 triliun Rupiah.

"Kalau angka-angka tersebut akurat, maka merosotnya anggaran riset nasional ini cukup signifikan, dari Rp 15 T menjadi hanya Rp 5 T. Tersisa hanya sepertiganya," jelas Sesmenristek era Presiden SBY ini.

"Jadi sangat wajar kalau kita mempertanyakan janji Pemerintah untuk mengkonsolidasikan anggaran riset di balik pembentukan BRIN ini," imbuh Mulyanto.

Untuk diketahui anggaran Iptek berdasarkan Data Kemenristek untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 33 T, Rp 35 T, dan 36 triliun.

Dari anggaran Iptek tersebut dialokasikan anggaran riset sebesar 50 persennya. Selebihnya untuk gaji dan dukungan manajemen lainnya.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Poster anggaran riset yang kecil ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengembangkan kegiatan riset tidak terbukti. Padahal sebelumnya, saat ingin membentuk BRIN, Pemerintah mengatakan anggaran riset akan dikonsolidasikan dalam satu lembaga. Tujuannya agar efisien dan efektif. Janji Pemerintah ingin mengkonsolidasikan anggaran riset melalui BRIN ternyata cuma janji kosong"

PKS MENDESAK PEMERINTAH

# PERPANJANG KERINGANAN PAJAK BURUH INDUSTRI

99

KUTIPAN

PKS minta Pemerintah untuk tidak memperlebar jurang ketidakadilan terkait pajak ini. Apalagi sekarang Pemerintah dengan DPR tengah membahas reformasi perpajakan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU itu disusun untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI



# Tolak Terorisme dan Radikalisme, **HNW: Bahasa Arab Bukan Cara Penyebarannya, Pancasila Serap Kosakata Bahasa Arab**

## KUTIPAN

Jakarta (10/09) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengkritisi dan mengoreksi pengaitan Bahasa Arab sebagai cara penyebaran Radikalisme

sebagaimana pernah dinyatakan oleh mantan Menteri Agama, Fachrul Razi atau memperbanyak bahasa Arab sebagai sarana penyebaran Terorisme sebagaimana dinukil dari pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati.

HNW mengingatkan justru ungkapan serapan yang berasal dari Bahasa Arab banyak disebut dalam Pancasila, yang membuktikan bahwa Bahasa Arab (kemahiran maupun memperbanyak penyebutannya) tidak terkait dengan radikalisme maupun terorisme.

"Memang sudah ada klarifikasi, tetapi tidak memadai karena stigma dan tuduhan

atau salah amatan itu tidak dikoreksi atau dicabut, padahal kesalahan penilaiannya teramat nyata," ungkap Hidayat.

HNW sapaan akrabnya mengingatkan, seandainya benar amatan itu, maka apa mungkin Indonesia yang memerangi terorisme dan radikalisme akan tetap meminta atau mengajari anak-anak Sekolah dan warga umumnya untuk menghafalkan dan mengamalkan Pancasila ?

Bukankah dalam Pancasila, lanjut HNW, terdapat banyak kosakata dalam Bahasa Arab yang diserap ke dalam Pancasila yang tetap menjadi dasar dan ideologi negara

Republik Indonesia.

"Bukankah dalam Pancasila tetap ada kata 'Adil' dalam sila kedua dan kelima, 'rakyat' pada sila keempat dan kelima, 'adab' pada sila kedua, serta 'hikmat', 'musyawarah', dan 'wakil' pada sila keempat, dan itu semua serapan dari bahasa Arab?!" ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (10/09).

Terorisme dan Radikalisme, imbuhnya, juga pasti bertentangan dengan demokrasi yang simbolnya ada di Parlemen.

"Sementara parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, masih tetap saja mempergunakan istilah dasar yang bahkan semuanya merupakan serapan dari bahasa Arab : Majelis, Musyawarat, Dewan, Wakil, Rakyat, Daerah. Bukankah itu semua berasal dari bahasa Arab ?," tanyanya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa tuduhan dan framing tendensius



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

**"Perlu rasional dan kritis juga, apabila penyebaran terorisme dikaitkan dengan penyebaran Bahasa Arab, lalu bagaimana dengan fakta penyebaran tindakan terorisme di Indonesia dan di dunia yang tidak terkait bahasa Arab."**

tersebut patut ditolak dan dikritisi, selain karena tidak sesuai dengan fakta, tetapi juga karena framing negatif itu mendowngrade nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan berdemokrasi dengan simbol Parlemennya.

"Jadi, apabila ada pernyataan memperbanyak

Bahasa Arab disebut sebagai salah satu ciri penyebaran terorisme, disadari atau tidak itu bisa jadi bentuk 'teror' terhadap Pancasila dan Parlemen Indonesia yang banyak ungkapnya diserap dari bahasa Arab," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Tolak Klaim Menag soal Anggaran Sosialisasi Batal Haji Hasil Kesepakatan dengan DPR

## KUTIPAN

Jakarta (07/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menolak pernyataan Menteri Agama soal anggaran diseminasi pembatalan haji senilai Rp 21,7 Miliar merupakan hasil kesepakatan Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. Menurut Bukhori, klaim sepihak tersebut tidaklah tepat.

Sebelumnya pada Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI tertanggal 30 Agustus 2021, Bukhori dan anggota Komisi Agama yang lain sempat menyorot anggaran senilai Rp 21,7 Miliar yang dialokasikan untuk kegiatan Diseminasi terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021.

Selain itu, anggaran senilai Rp 76 Miliar untuk Program Prioritas Kementerian Agama juga menimbulkan pertanyaan.

Sebagian anggota Komisi Agama DPR menganggap nilai anggaran itu terbilang fantastis untuk sebuah kegiatan

sosialisasi pembatalan haji, disamping soal program prioritas Kementerian Agama yang tidak mencantumkan penjelasan rinci ihwal peruntukannya.

Merespons hal itu, Menteri Agama Gus Yaqut mengaku keberadaan mata anggaran soal sosialisasi pembatalan haji adalah "hasil kesepakatan".

Lebih lanjut, dihadapan para Anggota Komisi VIII DPR, Gus Yaqut juga berjanji tidak akan melanggar hasil kesepakatan dengan dengan DPR. Walhasil, pernyataan janggal ini yang akhirnya menuai protes dari Bukhori.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah 1 ini mengatakan, salah satu dampak dari UU No. 2 Tahun 2020 adalah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimungkinkan diatur hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres) kendati secara konstitusional menegaskan kewenangan DPR.

Untuk diketahui, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 72/2020 untuk merevisi Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Postur APBN Tahun Anggaran 2020. Pemerintah beralih payung hukum ini dibentuk demi mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, perpres ini disebut sebagai payung hukum untuk outlook peningkatan defisit perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 yang sebelumnya defisit 5,07 persen terhadap PDB sebagaimana dalam Perpres yang lama, kemudian meningkat menjadi 6,34 persen terhadap PDB.



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Bagi kami, itu hanya 'lip service', karena sesungguhnya Kementerian Agama tetap bisa mengeksekusi anggaran tersebut tanpa bersepakat dengan DPR sekalipun, Artinya, perlu saya luruskan, bahwa tidak tepat jika mata anggaran yang disampaikan Kementerian Agama tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR:

“Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang menolak Perppu Covid yang kemudian disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020. Salah satu pertimbangannya, kami khawatir dengan pengelolaan uang rakyat yang dikerjakan

secara sepihak oleh pemerintah tanpa pengawasan ketat oleh DPR selaku wakil rakyat lantaran kewenangan kami yang diamputasi melalui UU itu,” tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Raker dengan Menag, Aleg PKS: Anggaran Pendidikan Kemenag Fantastis, Tapi Belum Maksimal

## KUTIPAN

Jakarta (03/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Agama menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Paud, Madrasah, Pesantren hingga Perguruan Tinggi hingga saat ini belum juga terdigitalisasi.

"Transformasi digital dalam dunia pendidikan itu sangat penting, akan memudahkan segalanya dan dalam pengawasan juga akan relatif lebih akuntabel. Inti dari digitalisasi adalah memproduksi kecerdasan dalam internet. Semua barang dan jasa yang diproduksi dengan bantuan internet pasti akan jadi trend global. Kita saat ini sangat tertinggal dari banyak negara lain untuk urusan digital, baik dari sisi ekonomi, sosial, industri maupun dunia pendidikan," tutur Iskan.

Menurut Iskan, saat ini Lembaga pendidikan islam semakin kalah pamor dan bisa

jadi lambat laun akan mati suri, tergerus oleh modernisasi digital yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan umum.

"Tentu amat disayangkan jika hal ini terjadi, mengingat Madrasah, Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam memiliki peranan penting dalam mencetak moral anak bangsa yang ber-akhlakul karimah," jelas Iskan.

Legislator asal Sumut II ini juga menjelaskan bahwa anggaran fungsi pendidikan di Kementerian Agama sangat besar, tapi masih minim untuk menganut sistem pendidikan yang terdigitalisasi.

"Ada 52 Triliun lebih yang

dianggarkan Kemenag, bahkan itu menyerap hampir 80 % dari total anggaran kemenag per tahunnya, tetapi kita bisa lihat faktanya di lapangan, sekolah-sekolah madrasah pesantren maupun perguruan tinggi belum terdigitalisasi secara baik, bahkan masih banyak yang tertinggal," ungkapnya.

"Yang kita inginkan saat ini adalah percepatan sistem digitalisasi dalam dunia pendidikan islam, agar sekolah atau lembaga pendidikan islam ini bisa lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Mulai penuhi fasilitas-fasilitas seperti komputer, laboratorium, dan jaringan wifi nya. Kemudian SDM seperti Guru ditingkatkan kompetensinya, menyediakan proyektor bagi guru mengajar, papan tulis interaktif, dan konten pembelajaran digital yang interaktif. Hingga pada fase seluruh kurikulum sudah berbasis ICT (Information and Communication Technologies)", tegas Iskan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**  
Dapil Sumatera Utara II

Digitalisasi itukan segala sesuatunya harus made in internet atau komputer. Nah, disini saya tidak melihat nya sama sekali arah kebijakan itu. Jadi, maksud saya harus nya kebijakan umum dan realisasi harus matching. Jangan hanya berhenti pada istilah digital saja tertulis, tapi kita lihat di program Paud, Madrasah , bahkan sampai Perguruan Tinggi tidak ada. Jadi, saya ingin hal itu semua harus diaktualisasi dalam program-program pada fungsi pendidikan di kementerian agama



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# Anggaran Penanganan Covid 2022 Turun 42,4 Persen

## Aleg PKS : Jangan Korbankan Insentif Nakes dan Jaminan Keluarga Nakes yang Meninggal

### KUTIPAN

Jakarta -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti anggaran dalam penanganan Covid-19 tahun 2022 yang turun 42,4 persen

Mufida mengingatkan pemerintah agar turunnya anggaran penanganan Covid jangan sampai korbankan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan juga jaminan keluarga nakes yang meninggal dunia dalam berjuang melawan Covid sebagaimana yang dijanjikan.

"Dalam penanganan Covid-19 APBN 2020 menganggarkan Rp60,6 triliun dengan fokus mengurangi penyebaran (protokol Kesehatan, alat Kesehatan, testing, klaim perawatan dan insentif nakes). Pada APBN 2021 anggaran penanganan

Covid mencapai Rp201,2 triliun dengan fokus pada vaksinasi dan testing/tracing. Sedangkan pada RAPBN 2022 anggaran penanganan Covid akan dianggarkan Rp115,9 Triliun dengan fokus penanganan yang lebih variatif banyak," kata Mufida, Jumat (27/8/2021).

Dikatakan Mufida, pada RAPBN 2022 dalam anggaran penanganan Covid target yang dicapai lebih besar dalam rangka Indonesia keluar dari pandemi covid-19. Namun sangat disayangkan anggaran malah meluncur tajam dan turun 42,4 persen dari tahun

2021. Padahal, fokus dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam membebaskan Indonesia dari Covid lebih besar dan beragam.

"Target dan fokus diantaranya adalah testing, tracing, treatment, perawatan pasien Covid-19, vaksinasi, obat Covid-19, insentif nakes, penanganan kesehatan daerah. Namun sangat disayangkan justru penganggarnya menurun sangat drastis hingga 42,4 persen. Saya tidak paham mengapa pemerintah justru menurunkan anggaran demikian besar, yang berbanding terbalik dengan target yang besar," tegas Anggota DPR RI dari DKI Jakarta 2 yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.

Menurut Mufida, target yang ambisius dari pemerintah agar seluruh masyarakat Indonesia divaksin seperti akan mengendor bila anggaran penanganan vaksin tahun 2022 akan dikurangi. Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum divaksin dan banyak daerah yang masih kekurangan stok vaksin. Sehingga target vaksinasinya sampai akhir 2021 pesimis bisa dicapai dengan kondisi yang ada, yang artinya akan bergeser ke 2022.

Selain itu, tutur Mufida, turunya anggaran Covid 2022 jangankan mengorbankan insentif nakes dan juga keluarga nakes yang gugur dalam berjuang



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Jujur saya mempertanyakan anggaran tersebut pastinya nanti berpotensi akan korbankan insentif nakes. Bisa-bisa insentif nakes akan berkurang karena anggaran semakin menipis, selain itu jaminan keluarga nakes yang gugur apa akan direalisasikan tahun 2022 karena anggaran penanganan Covid semakin kecil,"

mengurangi Covid.

"Jujur saya mempertanyakan anggaran tersebut pastinya nanti berpotensi akan korbankan insentif nakes. Bisa-bisa insentif nakes akan berkurang karena anggaran semakin menipis, selain itu

jaminan keluarga nakes yang gugur apa akan direalisasikan tahun 2022 karena anggaran penanganan Covid semakin kecil," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Kebocoran Data Terulang, Aleg PKS: **Pemerintah Tak Peduli** dengan Jaminan Keamanan Data Rakyat

**KUTIPAN**

Jakarta (01/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menilai adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.

"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (01/09).

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.

"Bagaimana keamanan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus

memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," katanya.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya.

Menurut Netty, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kecacauan pada validitas data Covid-19.

"Beberapa waktu lalu

pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuka kecacauan?" tanya Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.

"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data," ungkapnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat.

"Aku kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf

**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum"

lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.

Selain itu, kata Netty, libatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum.

## KEBOCORAN DATA E-HAC

# PEMERINTAH **TAK** **PEDULI** KEAMANAN DATA RAKYAT

**A**plikasi eHAC yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menampung data telusur Covid-19 serta berisi identitas lengkap seseorang yang hendak bepergian, ditemukan alami kebocoran. Temuan ini disampaikan oleh Tim peneliti vpnMentor, Noam Rotem dan Ran Locar.



**Sukamta: Keamanan data tutup celah Kejahatan Cyber**

“Maraknya kasus penipuan online, saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat. Artinya keamanan data pribadi yang kuat akan menutup banyak celah kejahatan cyber



**Amin: Merugikan masa depan Indonesia**

“Ditengah boomingnya pemanfaatan e-commerce di Indonesia, terlebih lagi Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian e-commerce Asean. Maka

lemahnya keamanan data di Indonesia sangat merugikan konsumen dan mengancam masa depan perdagangan digital di Indonesia



**Netty: Menurunkan Kepercayaan Aplikasi Pemerintah**

“Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah”



**Mufida: Harus ada tindakan yang tegas**

e-Hac erat kaitannya dengan sistem penanganan Covid-19 di Indonesia. Terlebih sistem yang baru terhubung dengan aplikasi Pedulilindungi yang memuat data vaksinasi. Meski sudah ada jaminan data di PeduliLindungi aman, lewat kasus ini seharusnya ada tindakan tegas guna memulihkan kepercayaan publik.

# Wakil Ketua Komisi X FPKS **Tolak** Aturan Sekolah Penerima BOS Harus Minimal Punya 60 Murid

**KUTIPAN**

Semarang (06/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menolak beleid PermendikbudRistek nomor 6 tahun 2021 yang mensyaratkan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) minimal harus memiliki 60 murid.

“Aturan ini mendiskriminasi hak dasar anak-anak Indonesia untuk bersekolah dan melanggar konstitusi kita,” tegas Fikri di Jakarta, Senin (06/09).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, aturan yang membatasi sekolah penerima BOS harus memiliki siswa minimal 60 orang tersebut menyalahi konstitusi negara secara umum.

Preambule (pembukaan) UU Dasar menegaskan tujuan negara salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.

Fikri menambahkan, tujuan alokasi dana BOS sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), bahwa Setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya “Kewajiban ini secara letterlijk atau harfiah, sehingga BOS menjadi hak setiap anak sekolah di Indonesia untuk menikmatinya tanpa kecuali,” jelasnya.

Adanya persyaratan jumlah murid bagi sekolah penerima dana BOS tertera dalam PermendikbudRistek nomor 6/2021 Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Ketentuan tersebut berbunyi, ‘memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir’.

Fikri menyatakan, pada dasarnya BOS digunakan untuk

kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik yang bersekolah di jenjang Pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan amanat program wajib belajar.

“Jadi bukan semata untuk sekolahnya, tapi untuk murid yang bersekolah di situ, karena basis perhitungan besaran BOS berdasarkan jumlah murid,” urai dia.

Diskriminasi atas sekolah dengan jumlah murid di bawah 60 orang juga berpotensi menimbulkan kesenjangan yang tajam bagi daerah-daerah pada kondisi tertentu.

“Misalnya di daerah dengan geografi dan biografi yang tidak menguntungkan,” kata dia.

Walaupun di pasal 3 ayat (3) PermendikbudRistek no.6/2021 tersebut pengecualikan sekolah dengan kondisi tertentu, antara lain sekolah di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, dan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Pada dasarnya BOS digunakan untuk kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik yang bersekolah di jenjang Pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan amanat program wajib belajar. Jadi bukan semata untuk sekolahnya, tapi untuk murid yang bersekolah di situ, karena basis perhitungan besaran BOS berdasarkan jumlah murid”

tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Namun, menurut Fikri penetapan sekolah dengan kondisi khusus/ tertentu itu hanya akan memperpanjang jalur birokrasi bagi sekolah-sekolah yang berhak untuk menerima dana

BOS reguler.

“Padahal prinsip dasar Konstitusi kita adalah bagaimana pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkeadilan, termasuk dalam alokasi dana BOS,” tutupnya.

# Permendikbud Dana Bos Tuai Polemik, Komisi X FPKS: Pendidik Adalah Hak Setiap Anak Bangsa!

## KUTIPAN

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal,

mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk merubah ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Ketentuan tersebut, kata Mustafa, adalah syarat sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

“Ketentuan ini akan semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antar anak bangsa. Apalagi saat ekonomi sulit di masa pandemi seperti ini. Saya minta Mendikbud untuk merubah ketentuan tersebut,” kata Mustafa Kamal pada Selasa (07/09/2021).

Selain itu, menurut Mustafa, sedikitnya jumlah siswa

tidak menentukan buruknya kualitas suatu sekolah. Jika tidak dirubah akan banyak sekolah yang tutup karena menurunnya kesempatan mendapatkan dana BOS.

“Itu bisa berdampak pada drop out nya peserta didik dan para guru menjadi pengangguran. Apabila memang benar karena kualitas yang buruk, seharusnya Pemerintah hadir meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kecil tersebut. Bukan malah menghentikan dukungan, ini tindakan tidak bertanggung jawab,” tegas Mustafa yang juga Anggota Fraksi PKS ini.

Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 pada aturan tersebut tentang pengecualian jumlah bagi sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang

berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain berdasarkan usulan kepala Dinas kepada Menteri.

“Apalagi sekolah yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), ini akan semakin memperpanjang jalur birokrasi bagi sekolah-sekolah tersebut karena mereka berhak menerima dana BOS reguler, seharusnya kita mempermudah anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkeadilan” tambah Mustafa.

Terakhir Mustafa juga mengapresiasi langkah Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang menolok aturan tersebut karena dinilai diskriminatif dan dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**

Anggota Komisi X DPR RI

“Itu bisa berdampak pada drop out nya peserta didik dan para guru menjadi pengangguran. Apabila memang benar karena kualitas yang buruk, seharusnya Pemerintah hadir meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kecil tersebut. Bukan malah menghentikan dukungan, ini tindakan tidak bertanggung jawab”

# BSNP Dibubarkan, Anggota Komisi X FPKS: Mubazir dan Sembrono

## KUTIPAN

Jakarta (01/09) --- Terbitnya Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memunculkan reaksi keras dari anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Pasalnya, menurut Ledia, pada pasal 334 menyatakan mencabut peraturan-peraturan terkait kedudukan BSNP yang sesungguhnya merupakan turunan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003.

"Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluaran regulasi. Biar nggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya," kata Ledia mengkritik dengan pedasnya.

Lewat Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Nadiem Makarim membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan

dan berencana menggantinya dengan pembentukan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah unit kerja Kemendikbudristek dan bertanggung jawab kepada Menteri sebagaimana tercantum di Pasal 233.

"Tidak hanya persoalan labrak tata aturan perundangan yang ini merupakan kesalahan mendasar dari seorang Menteri dalam menjalani kegiatan bernegara, ketentuan yang dikeluarkan Mas Menteri ini juga punya beberapa masalah yang bisa menghambat pemberian dukungan pada peningkatan kualitas sistem pendidikan kita," ungkapnya.

Pertama, kata Ledia, Badan Standar Nasional

Pendidikan merupakan turunan amanah UU Sisdiknas di pasal 35 yang menyebutkan: 'pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.'

Selanjutnya pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa 'badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.'

Maka menghapuskan badan mandiri ini adalah mengabaikan amanah UU yang notabene secara hierarki perundangan lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Menteri.

Kedua, ketika bicara Badan Standar Nasional Pendidikan, maka sifat cakupannya adalah lingkup pendidikan secara nasional. Baik lingkup pendidikan yang berada di bawah Kemendikbudristek, Kemenag maupun Kementerian dan Lembaga lainnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

"Penyelenggara pendidikan di negeri ini tidak hanya dinaungi oleh Kemendikbudristek. Ada sekolah dan kampus di bawah Kementerian Agama, juga ada sekolah dan kampus di bawah Kementerian dan Lembaga lain, semisal sekolah dan kampus yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Maka semua urusan pengembangan, pemantauan, pengendalian Standar Nasional Pendidikan menjadi amanah BSNP ini. Tidak bisa diatur oleh badan yang hanya ada di level unit kerja Kemendikbudristek," .

# Anggota FPKS Pertanyakan Aspek Keadilan dan Pemerataan DAK Fisik Pariwisata

**KUTIPAN**

Jakarta (02/09) --- Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi daerah.

Hal tersebut diungkapkan Sakinah dalam rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu, (01/09/2021).

"Hari ini saya dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah setelah mendengar pemaparan dari pak menteri tadi sekali lagi harus mengelus dada. Karena saat ini dan sampai tahun 2022 nanti masyarakat Sulawesi Tengah tidak mendapatkan alokasi DAK Pariwisata," ungkapnya.

Kalua kita melihat pemaparan yang disampaikan pak Menteri terkait dengan lokasi DAK bidang pariwisata tahun 2022 terdapat 93 Kabupaten/Kota yang terletak di 20 Provinsi. Tentunya kami sangat merasa prihatin.

"Sulawesi Tengah terdapat

12 Kabupaten dan 1 Kota dengan destinasi pariwisata yang tidak kalah indahnya dengan provinsi-provinsi lain. Kami merasa heran apa yang menjadi kendala, sehingga pemerintah tidak melirik Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI ini juga mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan asas keadilan dan pemerataan.

Aspek keadilan dan pemerataan ini sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan antardaerah," tutur Anggota DPR RI yang selaku konsisten dengan aspirasi Dapilnya," ujarnya.

Distribusi dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

harus dirasakan setiap daerah tanpa menganak tirikan daerah lain. Justru daerah-daerah yang berada di daerah 3T harus mendapatkan perhatian lebih serius.

Dalam rapat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini pun Sakinah berharap agar masyarakat yang akan mengakses bantuan BIP bagi pelaku ekonomi kreatif lebih dipermudah.

"Jagan terlalu dipersulit, kami ini di Sulawesi Tengah sudah sering mendapatkan cobaan berulang-ulang. Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan BIP harus memenuhi persyaratan yang banyak dan susah. Kami berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengusaha yang besar saja tapi juga harus memperhatikan pengusaha kecil. Karena dari yang kecil ini Indonesia akan mendapatkan keberkahan," pungkasnya.

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI

"Jagan terlalu dipersulit, kami ini di Sulawesi Tengah sudah sering mendapatkan cobaan berulang-ulang. Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan BIP harus memenuhi persyaratan yang banyak dan susah. Kami berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengusaha yang besar saja tapi juga harus memperhatikan pengusaha kecil. Karena dari yang kecil ini Indonesia akan mendapatkan keberkahan"

# Legislator PKS Soroti Kebijakan BOS yang 'Diskriminatif'

## KUTIPAN

Jakarta (08/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Fahmy, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d telah menuai kegaduhan.

"Sejumlah ormas besar menolak dan menganggap kebijakan (penyaluran BOS) tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sosial, alias diskriminatif. Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa dana bantuan sekolah (BOS) hanya diberikan kepada sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang selama tiga tahun terakhir," ungkap Anggota Komisi X DPR RI ini.

Dengan perkataan lain, imbuh Fahmy, dana BOS tidak akan diberikan kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 orang, dengan pengecualian bagi sekolah-

sekolah tertentu.

"Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk 'memaksa' sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit hendaknya bergabung dengan sekolah lain demi alasan efisiensi. Besarnya dana BOS di tahun 2021 sebesar Rp 53,4 triliun yang akan dibagi kepada 216.662 sekolah di jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Indonesia. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, APBN 2021," papar Fahmy.

Besaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah pada tahun ini, kata Fahmy, disesuaikan dengan kondisi sekolah penerima, tergantung dari daerahnya yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni: Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik, dan Indeks Besarana Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan

jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Dana BOS ini sangat membantu pihak sekolah untuk melancarkan operasional sekolah sehari-hari. Terlebih di saat pandemi yang sudah berlangsung 1,5 tahun, memaksa sekolah untuk menyiapkan segala perangkat TIK dan alat-alat penunjang lainnya guna menunjang pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka-terbatas," urai Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V ini.

Selain itu, kata Fahmy, dana BOS juga sangat diperlukan untuk membantu menambah kesejahteraan para guru, terutama yang berstatus honorer.

"Hakikatnya Dana BOS itu diberikan untuk membantu sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dan kebanyakan sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal," pungkasnya.

Diantara sekolah-sekolah yang patut mendapat bantuan itu, kata Fahmy, tentu saja ada sejumlah sekolah yang jumlah muridnya tidak banyak. Kebanyakan sekolah-sekolah yang muridnya sedikit dikelola



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES,  
MM, M.Ed**  
Anggota Komisi X DPR RI

"Dana BOS ini sangat membantu pihak sekolah untuk melancarkan operasional sekolah sehari-hari. Terlebih di saat pandemi yang sudah berlangsung 1,5 tahun, memaksa sekolah untuk menyiapkan segala perangkat TIK dan alat-alat penunjang lainnya guna menunjang pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka-terbatas."

oleh masyarakat (Yayasan), atau oleh ormas-ormas keagamaan yang sangat peduli kepada Pendidikan.

"Bahkan ormas semisal Muhammadiyah sudah berkhidmat di bidang Pendidikan sejak awal mereka berdiri, jauh

sebelum Indonesia merdeka. Mereka tetap konsisten dan bersemangat menyelenggarakan Pendidikan, meskipun jumlah muridnya tidak banyak," tandasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Rapat dengan OJK, Aleg PKS Dorong Keberadaannya Bisa Dirasakan Lebih Luas oleh Bank Kecil dan UMKM

**KUTIPAN**

Jakarta (28/08) — Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (26/8/2021).

Dalam rapat yang dilakukan secara virtual ini, OJK memaparkan 3 Peraturan OJK (POJK) yaitu POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan catatan dan masukan untuk OJK.

Membuka pembicaraannya, Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini memberikan apresiasi kepada OJK yang responsif menerbitkan aturan-aturan dalam

rangka untuk mengakselerasi peran-peran bank umum.

“Saya juga tertarik dengan salah satu manfaat dari Peraturan OJK (POJK) ini yaitu manfaat yang pertama kesetaraan antara bank konvensional dan Syariah,” kata Anis.

Menurut Anis, POJK ini mempercepat transformasi digital yang berlaku untuk bank syariah dan konvensional.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan bank syariah masih belum sepesat bank konvensional. Karenanya, bank Syariah belum bisa berlomba dengan bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang belum mencapai 10%.

“Ini mengakibatkan market share bank syariah yaitu warga negara kita yang mayoritas mus-

lim, tetapi belum terkoneksi dengan keberadaan bank syariah di hati masyarakat,” ujar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memberikan saran kepada OJK agar bisa mengkaji lebih dalam mengenai strategi OJK untuk mencapai manfaat-manfaat yang menjadi sasarannya.

Enam manfaat yang disampaikan OJK dari POJK yang diluncurkannya adalah Kesetaraan antara Bank Konvensional dan Syariah, Mendorong Konsolidasi dan Sinergi antar Bank, Konektifitas dan Kolaborasi, Mendorong Efisiensi Ekonomi, Pemberdayaan Bank Skala Kecil dan Meningkatkan Inklusi Keuangan.

Menanggapi manfaat yang pertama, Anis mengatakan “OJK perlu memperdalam kajian dan perencanaan mengenai strategi yang akan dilaksanakan agar bisa mempercepat transformasi digital yang berlaku untuk bank syariah dan bank konvensional.”

Anis juga menyampaikan bahwa persoalan digital untuk bank-bank kecil & Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih mene-



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

SDM yang dibutuhkan bank Syariah tentu berbeda dengan SDM yang dibutuhkan bank konvensional. Tidak hanya aspek manajerial saja yang perlu dikuasai akan tetapi karena karakteristik bank syariah dengan karakteristik bank konvensional berbeda, maka penguasaan akan nilai-nilai syariah itu juga sangat dibutuhkan. Peningkatan kualitas SDM ini juga belum nampak signifikan”

mukan sejumlah kendala. Apalagi jika bicara tentang UMKM.

Menurut data yang di rilis oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di

Indonesia sebanyak 64,2 juta unit. Dan baru 10 juta unit yang sudah go digital.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS: Pemerintah Harus Extra Waspada dan Redam Keinginan Terhadap Utang

## KUTIPAN

Legislator Fraksi PKS ini mengatakan pemerintah juga memperhatikan beban bunga utang yang harus ditanggung APBN yang merupakan uang dari rakyat dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap rupiah yang dikeluarkan.

Jakarta (03/09) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah hingga akhir Juli 2021 telah mencapai sebesar Rp 6.570,17 triliun atau naik 0,23 persen dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly menuturkan bahwa pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan meredam keinginan untuk terus berutang.

"Tidak dipungkiri bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan, perlindungan sosial harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, tetapi

terus berutang juga akan berbahaya pada situasi pendapatan negara yang makin terpuruk," ujar Junaidi dalam rilis yang diterima. Kamis (02/09/2021)

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS ini mengatakan pemerintah juga memperhatikan beban bunga utang yang harus ditanggung APBN yang merupakan uang dari rakyat dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap rupiah yang dikeluarkan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022

pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 405,87 triliun untuk pembayaran bunga utang.

"Ini menjadi rekor dan bisa lebih besar lagi di tahun kedepannya ditengah posisi utang yang terus meningkat," ungkap Junaidi.

Oleh karenanya, Pria asal Lampung ini mengingatkan kepada pemerintah terkait dampak negatif dengan melonjaknya utang terhadap kesinambungan fiskal. Alokasi belanja untuk bayar bunga utang berbanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah utang pemerintah.

"Beban bunga utang yang akan dibayar pemerintah tahun depan akan mengurangi fleksibilitas belanja fiskal yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial," tutup Junaidi.



**Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

“Beban bunga utang yang akan dibayar pemerintah tahun depan akan mengurangi fleksibilitas belanja fiskal yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial”



PKS



**Akun Facebook Official  
Fraksi PKS DPR RI**

**BERPINDAH**

dari **Fraksi PKS DPR RI**  
menjadi

**FPKS DPR RI**



# Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan

## KUTIPAN

Jakarta (08/09) --- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria, tata ruang, dan pertanahan nasional.

Dari 276 juta jiwa rakyat Indonesia, masih banyak yang belum memiliki tanah. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada bidang pertanian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan berlaku sejak tahun 1960, sehingga BAKN akan merekomendasikan untuk membuat UU baru.

"Ini menjadi persoalan penting bagaimana pengelolaan tanah pertanian ini sehingga dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Indonesia masih menghadapi banyak sekali persoalan struktural kemiskinan misalnya kemiskinan terkait dengan lahan, banyak persoalan

kepemilikan lahan yang menjadi permasalahan. Reforma agraria yang menjadi salah satu telaah kami juga akan kita tinjau kembali bagaimana pelaksanaannya," ungkap Anis saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan sivitas akademika Universitas Airlangga, di Gedung Rektorat UNAIR, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan jangan sampai kekayaan alam ini tidak terurus atau justru menjadi lahan sengketa, sehingga tidak maksimal pembangunan yang ada di atasnya. Dan BAKN berkepentingan bisa menelaah lebih dalam persoalan-persoalan pertanahan ini termasuk juga perbaikan

terhadap undang-undang, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan.

"Indonesia ini sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa bumi air kekayaan alam itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bahwa artinya Indonesia dari segala sumber daya alam yang ada di dalamnya itu harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan itu adalah perintah undang-undang karena itu harus ada upaya-upaya untuk bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi," tandas Anis.

Anis pun berharap dengan adanya peran khusus dari BAKN DPR RI, bisa menyoroti persoalan dan memberi masukan kepada pemerintah lebih dalam lagi untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang ada.

"Seperti Undang-Undang Tahun 1960 (UU Pertanahan), kemudian terkait bagaimana reforma agraria bisa berjalan on the track, karena selama ini berjalan dengan cukup lambat," tutup legislator Dapil DKI Jakarta I ini.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Ini menjadi persoalan penting bagaimana pengelolaan tanah pertanian ini sehingga dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Indonesia masih menghadapi banyak sekali persoalan struktural kemiskinan misalnya kemiskinan terkait dengan lahan, banyak persoalan kepemilikan lahan yang menjadi permasalahan. Reforma agraria yang menjadi salah satu telaah kami juga akan kita tinjau kembali bagaimana pelaksanaannya"

# Opini WTP LKPP 2020, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Terbuai, **Bukan Tolok Ukur** Kinerja Anggaran

## KUTIPAN

Jakarta (09/09) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta Pemerintah jangan terbuai dan berpuas diri dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Wajar Tanpa Pengecualian hanya menyoroti serapan anggaran dengan pertanggungjawaban administratif. Capaian ini belum bisa digunakan sebagai tolok ukur kinerja anggaran dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi," katanya, dalam keterangan media, Kamis (09/09).

"Pemerintah tidak boleh terbuai apalagi merasa sudah berhasil karena opini WTP. Kunci keberhasilan kinerja program harus bisa diukur tingkat keluaran, dampak dan manfaatnya. WTP kurang bermakna dan tidaklah cukup jika pelaksanaan kegiatan di lapangan kacau-balau dan tidak memberikan dampak

signifikan," tambah Netty.

Apalagi, kata Netty, dalam catatan BPK terdapat selisih alokasi biaya program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam APBN 2020 dan publikasi Kementerian Keuangan sebesar Rp146,69 Triliun. Dalam APBN jumlahnya Rp841,89 triliun, berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang Rp695,2 triliun.

"Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang kurang optimal, bisa dibilang asal-asalan. Seharusnya pemerintah dapat mendeteksi kekeliruan tersebut sebelum dilaporkan dalam publikasi pemerintah. Bukan hanya soal

angka, tapi juga skema sumber pendanaan, penggunaan, maupun manfaat yang diterima oleh rakyat dari program tersebut," tambahnya.

Netty juga mengatakan bahwa Fraksi PKS DPR RI beberapa waktu lalu merupakan satu-satunya Fraksi yang mengajukan nota keberatan atau minderheids atas laporan pertanggungjawaban realisasi APBN 2020.

"Pemerintah harus menindaklanjuti 23 catatan kritis FPKS atas penggunaan APBN 2020," katanya.

Menurut Netty, FPKS menyoroti catatan BPK terkait upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya, kebijakan pelaporan biaya penanganan Covid-19 yang belum mencakup mekanisme pelaporan secara utuh

"Data kegiatan atau pekerjaan pada Pemulihan Ekonomi Nasional tidak terkendali, sehingga terdapat nilai DIPA yang lebih tinggi dari nilai alokasi anggaran," ujar Netty.

Selain itu, kata Netty, ditemukan adanya penggunaan



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pemerintah tidak boleh terbuai apalagi merasa sudah berhasil karena opini WTP. Kunci keberhasilan kinerja program harus bisa diukur tingkat keluaran, dampak dan manfaatnya. WTP kurang bermakna dan tidaklah cukup jika pelaksanaan kegiatan di lapangan kacau-balau dan tidak memberikan dampak signifikan"

akun khusus Covid-19 yang belum tertib, program dalam cluster perlindungan sosial belum mempertimbangkan akuntansi bantuan sosial serta

pengendalian atas pelaporan realisasi PC-PEN BLT dana desa yang belum sepenuhnya memadai.

# Anggota Banggar FPKS Ingatkan Utang Pemerintah Sudah Sangat Rawan

## KUTIPAN

Jakarta (07/09) --- Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengungkapkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan utang yang menjadi kewajiban Pemerintah pada tahun 2020 sebesar 6.625,4 triliun atau 59,69 persen dari aset sebesar 11.098,6 triliun.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas keuangan negara sudah sangat rawan.

"Karena itu pada APBN 2021 yang sedang berjalan ini alangkah baik bila Pemerintah mengurangi resiko solvabilitas dengan cara mengurangi utang agar tidak menjadi beban keuangan pada tahun berikutnya," papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (07/09).

Selain besarnya jumlah utang, kata Hermanto, terdapat temuan saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun 2020 sebesar 388,1 triliun.

"Ini menunjukkan, Pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan belanja negara. Pemerintah tidak memiliki perencanaan APBN yang akurat," tandas Legislator asal Dapil Sumatera Barat ini.

Besarnya jumlah utang dan SAL tahun 2020 merupakan 2 dari 26 catatan temuan BPK terkait implementasi APBN 2020.

"Meskipun APBN telah disusun berdasarkan UU No. 2 tahun 2020 dan telah terjadi refocusing yang berulang kali, namun ternyata tidak menjamin Kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara semakin baik," tutur Hermanto.

"Dua puluh enam temuan BPK, belum beresnya penanganan wabah covid-19 dan tidak tercapainya target makro ekonomi meskipun Pemerintah telah menetapkan PEN pada tahun 2020 menjadi beban anggaran pada tahun 2021 dan 2022," tambahnya.

Lebih jauh Hermanto meminta Pemerintah agar menindaklanjuti 26 temuan BPK secara akuntabel dan kredibel karena APBN merupakan cermin dari komprehensivitas kebijakan pendapatan dan belanja negara yang berdampak terhadap kinerja makro ekonomi nasional. Temuan BPK tersebut berhubungan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang memiliki implikasi terhadap opini dan kepercayaan publik kepada Pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Pemerintah harus menindaklanjuti temuan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat," ucap Hermanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Badan Anggaran DPR RI

"Pemerintah harus menindaklanjuti temuan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, Hasil implementasi APBN 2020 harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah agar lebih akurat dalam menyusun APBN tahun-tahun berikutnya,"

# Fraksi PKS Menerima RUU Pertanggungjawaban APBN 2020 Sri Mulyani: **Kinerja Pemerintah Buruk, Utang Bengkak hingga Rp6.080 T**

## KUTIPAN

Jakarta (06/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban APBN 2020 pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan minderheit nota, menerima dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam pembicaraan tingkat I untuk dilanjutkan dalam tahapan selanjutnya,” ujar legislator PKS Muhammad Nasir Djamil dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan Menkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 September 2021.

Dalam pemaparannya, Djamil menyebut fraksinya memberikan catatan atas pelaksanaan APBN 2020 yang kemudian dirangkum dalam beberapa poin penting.

“Pertama, buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan utang dan hal ini diperparah dalam kondisi andemi,” tutur dia.

Djamil menjelaskan, total utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, kenaikan utang sepanjang 2020 yang mencapai Rp1.293,5 triliun

atau 27,2 persen dari 2019 adalah bukti pengelolaan kewajiban negara tersebut.

“Tingginya utang seiring dengan beban bunga pada 2020 sebesar 317,89 triliun, atau meningkat 14,67 persen dari 2019 yang sebesar Rp277,23 triliun. Nilai tersebut adalah sejarah baru dalam akumulasi utang yang meningkat dalam satu tahun anggaran dan rasio utang terhadap PDB 2020 adalah yang tertinggi” katanya.

“Penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara, memunculkan kekhawatiran terhadap pemerintah terhadap kemampuan membayar utang dan bunga utang. Sebagai catatan, jumlah tersebut belum memperhitungkan jumlah utang BUMN yang merupakan entitas yang dimiliki pemerintah,” sambung dia.

Kedua adalah soal kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara



## H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Badan Anggaran DPR RI

“Tingginya utang seiring dengan beban bunga pada 2020 sebesar 317,89 triliun, atau meningkat 14,67 persen dari 2019 yang sebesar Rp277,23 triliun. Nilai tersebut adalah sejarah baru dalam akumulasi utang yang meningkat dalam satu tahun anggaran dan rasio utang terhadap PDB 2020 adalah yang tertinggi”

yang merujuk pada instrumen fiskal. Disebutkan Djamil, realisasi keseimbangan primer tercatat negatif Rp633,61 triliun yang berarti defisit

keselimbangan primer ini melonjak 766,42 persen dari 2019 yang sebesar Rp73,1 triliun,” sebutnya.

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Aleg PKS Serap Aspirasi Warga Pasar Ciawi Tasikmalaya Sekaligus Serahkan 10 buah APAR

## KUTIPAN

Tasikmalaya (30/08) --- Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PKS, Toriq Hidayat, meninjau Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Pascakebakaran melanda beberapa waktu lalu, Pasar Ciawi kini telah bersih dari sisa kebakaran, Sabtu (28/08).

“Puing-puing sisa kebakaran yang melanda Pasar Ciawi Kabupaten Tasikmalaya telah dibersihkan pada Jumat (20/8). Pembersihan itu dilakukan agar pembangunan bagian pasar yang terbakar itu dapat segera berjalan, sehingga para pedagang bisa kembali berjualan,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Toriq bersyukur karena didapat informasi bahwa telah dilaksanakan musyawarah pengurus pasar dan pedagang pasar yang terdampak kebakaran pada Rabu (18/8). Dari hasil rapat itu, para pedagang ingin cepat kembali bisa berjualan.

“Alhamdulillah hasil rapat langsung ditindaklanjuti. Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sedang menyusun rencana agar bagian pasar yang terbakar itu dapat segera digunakan kembali oleh para pedagang berjualan, meski dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Toriq berjanji kepada Pengurus HIPPAS (himpunan pedagang pasar) Ciawi bahwa ia akan terus memantau dan memastikan pemerintah daerah segera melakukan pembangunan 34 kios dan 36 lapak milik pedagang kaki lima (PKL) yang terbakar, agar segera beroperasi kembali.

Selain menyerap aspirasi warga Pasar Ciawi, Politisi PKS sekaligus menyerahkan 10 alat pemadam api ringan (APAR).

“10 tabung pemadam yang berisi dry chemical atau Co2 ini diharapkan menjadi pertolongan pertama untuk memadamkan api atau meminimiliasi kebakaran, sebelum petugas pemadam datang,” sebut Toriq.

APAR sebanyak 10 buah tersebut diterima oleh Kepala UPTD Pasar Ciawi Tasikmalaya. Toriq juga mengingatkan warga pasar Ciawi agar melakukan sejumlah langkah antisipasi kebakaran akibat korsleting listrik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya insiden yang sama.

“Matikan lampu dan cabut kabel saat selesai pakai peralatan listrik. Jangan biarkan kabel standby di steker, Kedua tidak menumpuk steker, ketiga tidak mengganti sekring pemutus arus induk tanpa izin. Keempat rawat instalasi listrik secara berkala, kelima usahakan menempatkan dan mengetahui lokasi APAR di titik-titik strategis pasar,” himbaunya.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Matikan lampu dan cabut kabel saat selesai pakai peralatan listrik. Jangan biarkan kabel standby di steker, Kedua tidak menumpuk steker, ketiga tidak mengganti sekring pemutus arus induk tanpa izin.

Keempat rawat instalasi listrik secara berkala, kelima usahakan menempatkan dan mengetahui lokasi APAR di titik-titik strategis pasar”

# Gelar Vaksinasi di Jakarta, Mufida Minta Jaminan Keamanan Soal Data

## KUTIPAN

Jakarta (05/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menggelar vaksinasi massal di beberapa titik di wilayah Pancoran, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu-Ahad (04-05/09/2021).

Program vaksinasi massal di Jakarta Selatan ini adalah program kemitraan dengan Kementerian Kesehatan. Tak kurang sejumlah 2.000 warga Jakarta mengikuti agenda vaksinasi massal ini.

Mufida bersyukur antusiasme masyarakat guna mengikuti vaksin masih tetap tinggi. Mufida meminta semangat masyarakat mengikuti vaksin dijaga dengan meminimalisir isu dan menjaga jaminan keamanan data vaksin publik.

"Isu soal vaksinasi ini sangat dinamis. Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Teranyar data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak

pertanyaan soal keamanan data vaksinasi," papar Mufida saat meninjau vaksinasi massal di bilangan Kebayoran Lama, Ahad (05/09).

Anggota DPR Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini meminta pemerintah menjamin data vaksinasi publik sebab mengandung informasi pribadi yang rentan disalahgunakan.

Terlebih belum lama 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC bocor dan publik bertanya tentang keamanan data mereka di aplikasi PeduliLindungi yang terkoneksi dengan proses vaksinasi.

"Jika data vaksinasi seorang Presiden bisa bocor ke publik lalu bagaimana dengan masyarakat biasa? Saat banyak tempat mensyaratkan penun-

jukan bukti telah vaksin, maka keamanan data publik pasca vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi," ungkap dia.

Terkait program vaksinasi di Jakarta, Mufida berharap bisa turut membantu target vaksinasi 2 juta dosis per hari untuk bulan September ini.

"PKS mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat salah satunya vaksin. Kita perlu bekerjasama dengan semua pihak bukan hanya pemerintah tapi juga DPR untuk membantu percepatan dan target vaksinasi 2 juta sehari yang masih jadi PR," papar Mufida.

Mufida mengingatkan bagi setiap warga meskipun sudah mendapat vaksin tetap menjalankan protokol 5M secara disiplin. Mufida juga menyampaikan tentang sosialisasi vaksinasi bersama tokoh masyarakat di Jakarta Selatan.

"Kami titip pesan kepada para tokoh masyarakat bersama saling mengingatkan dan menjaga. Yang belum vaksin diberikan edukasi dan pelayanan agar bisa vaksin dan yang sudah vaksin terus bisa disiplin menjaga protokol 5M," ujar Mufida.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Isu soal vaksinasi ini sangat dinamis. Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Teranyar data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi"



# Soal Batalnya Presiden Jokowi ke Ponpes Husnul Khatimah, Aleg PKS: Istana Jangan Prank Terus

KUTIPAN

Jakarta (07/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengaku kecewa berat dengan batalnya Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi pondok pesantren Husnul Khatimah di Kuningan, Jawa Barat, yang menurut rencana dilaksanakan pada Selasa (31/09/2021).

Menurut Surahman, apa yang dilakukan Presiden Jokowi bukan kali ini saja, beberapa pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

"Rupanya Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Jokowi tidak lebih dari sekadar pencitraan belaka atau lips service. Banyak fakta yang terlanjur jadi korban prank yang dilakukan oleh beliau," ungkapnya.

Surahman menambahkan, seperti dibatakannya kunjungan RI 1 ke Ponpes Husnul Khatimah Kuningan, ponpes terbesar di kabupaten yang dipimpin oleh kader dari

partai penguasa, Bupati dan ketua DPRD nya sekaligus. "Ada yang lebih serius dari sekedar membuat kecewa pimpinan beserta tujuh ribuan santri ponpes Husnul Khatimah Kuningan. Hal paling Substantif dari yang politis adalah gagalnya kesejatan, dalam istilah profetiknyanya adalah 'Al-Shiddq' atau kejujuran," ungkapnya.

Nabi Muhammad saw, jelas Surahman, telah mewanti-wanti umat beliau untuk berlaku jujur sejati. Sebab jujur akan membawa segala kebaikan di dunia, dan mengantarkan ke surga di akhirat.

"Sebaliknya, kalian jangan

berdusta. Sebab dusta akan membawa segala keburukan dan kegagalan moral. Seseorang yang berulang kali tidak jujur akan dilak dadanya sebagai kaddzab. Kemudian mengantarkan ke neraka." (HR. Bukhari Muslim). Hadits tersebut adalah nasihat sekaligus warning bagi umat Nabi Muhammad Saw," terang Surahman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menurut rencana akan mengunjungi Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan pada (31/08/2021) dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi para santri di Ponpes tersebut.

Informasi kedatangan Jokowi ke Husnul Khatimah telah diterima oleh pembina Yayasan, KH Achidin Noor beberapa hari sebelumnya.

Lalu pihak pesantren melakukan berbagai persiapan berupa penyiapan santri yang akan divaksin, pemasangan tenda hingga sterilisasi ruangan-ruangan yang ada oleh pihak BIN.

Satu hari jelang kedatangan Jokowi ke Kuningan, tepat-



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat X

"Pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Rupanya Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Jokowi tidak lebih dari sekadar pencitraan belaka atau lips service. Banyak fakta yang terlanjur jadi korban prank yang dilakukan oleh beliau"

nya Senin 30 Agustus tidak ada info pembatalan kunjungan Jokowi ke Husnul. Bahkan hingga hari H, yaitu Selasa 31 Agustus 2021 tidak ada informasi sama sekali tentang pembatalan kunjungan tersebut.

Atas pembatalan tersebut, yang tidak disertai info sama sekali dari protokol kepresidenan pihak pengurus Yayasan merasa terkena prank, demikian yang diungkapkan oleh Achidin.



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



*Selamat & Sukses*

Kepada

**Prof. Dr. Ir. Nurmahmudi  
Ismail, M.Sc**

Atas Penguuhan Selaku

Professor Riset  
Bidang Teknologi Pascapanen

# Kundapil, Andi Akmal Serahkan Penggilingan Padi

KUTIPAN

Kabupaten Bone (30/08) — Legislator asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin melakukan serah terima penggilingan padi (RMU/Rice milling unit) di Desa Biccoeng Kec. Tonra, Kab. Bone.

Penggilingan padi ini diharapkan Akmal, mampu melayani penggilingan padi dari petani dalam satu desa bahkan beberapa desa sekitar.

"Dengan mendekatkan mesin penggilingan di sentra-sentra produksi padi ini, kedepannya akan memangkas biaya operasional terutama biaya transportasi. Selain itu, kecepatan dan baiknya kualitas mesin penggiling akan menjadi penentu kualitas beras hasil giling sehingga meminimalisir beras pecah", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, banyak hal yang bisa optimalkan dari penggilingan padi, terutama pada produk turunan yang sekaligus seperti limbah. Ada yang bisa dibuat pakan unggas berupa dedak, atau bahan campuran media tanam yang bersal dari sekam

baik di bakar atau langsung.

Serah terima penggilingan padi selain dihadiri langsung oleh Akmal, juga turut dihadiri dinas pertanian setempat dan juga beberapa petani dan relawan yang selama ini bekerja dan bertugas mengumpulkan aspirasi warga terutama aspirasi petani.

"Saya berharap, setiap desa yang memiliki kemampuan produksi padi yang baik, disitu ada penggilingan padi. Ini menjadi penting karena pengolahan pasca panen menjadi titik awal peningkatan nilai tambah komoditas pertanian. Dengan adanya penggilingan padi yang dekat dengan sentra produksi, mudah-mudahan menjadi peningkat kualitas beras yang dihasilkan untuk di konsumsi masyarakat", tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Saya berharap, setiap desa yang memiliki kemampuan produksi padi yang baik, disitu ada penggilingan padi. Ini menjadi penting karena pengolahan pasca panen menjadi titik awal peningkatan nilai tambah komoditas pertanian. Dengan adanya penggilingan padi yang dekat dengan sentra produksi, mudah-mudahan menjadi peningkat kualitas beras yang dihasilkan untuk di konsumsi masyarakat",

# Saat di Dapil, Nevi Zuairina Launching Buku 'Memoar Energi Bundo Kanduang'

## KUTIPAN

Padang (05/09) --- Tidak banyak perempuan yang dalam keseharian beraktivitas secara multitasking atau mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dengan hasil yang maksimal.

Perempuan Minang memiliki kemampuan seperti itu, salah satunya Nevi Zuairina, Anggota DPR RI dari Sumatera Barat.

Luar biasa Nevi menjalani kehidupannya bersama sang suami yang merupakan Eks Gubernur Sumatera Barat dua periode Irwan Prayitno dan anak-anaknya.

Nevi mengasuh dan membesarkan anak, menjalankan bisnis, menjadi guru, beraktivitas di partai dan tidak lupa berinteraksi dengan sesama.

Aktivitas yang multitasking itu diperankan Nevi Zuairina seperti yang diceritakan dalam buku memoarnya yang diluncurkan Sabtu (04/09/2021) di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut Nevi menyatakan ada banyak catatan sebenarnya

yang ia buat, tetapi tidak semua catatan masuk ke dalam narasi buku lantaran dia pandang bisa mengganggu silaturahmi dengan pihak-pihak tertentu.

"Jadi ada bagian pengalaman yang saya catat tapi tidak masuk ke dalam buku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya ada bagian-bagian yang mungkin saya lupa mencatatnya, maklum itulah salah satu sifat lemah manusia, tidak semuanya serta merta teringat pada hal-hal yang sudah lama berlalu," kata Nevi Zuairina.

Yang spesial dari buku Memoar berjudul Energi Bundo Kanduang ini, kata pengantarnya ditulis oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani,

"Dari buku yang ditulis dengan pendekatan bertutur ini, saya mendapat kesan

tentang seorang perempuan yang penuh semangat, pantang menyerah dan senantiasa tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Pada kebanyakan yang dialami perempuan-perempuan aktif, selalu ada yang tertinggal salah satunya, ya suami, ya anak-anak ya membangun kapasitas diri sendiri," kata Puan Maharani dalam kata pengantarnya.

Tetapi menurut Puan, Nevi Zuairina berhasil melakoni seluruhnya dalam waktu bersamaan. Dan akhirnya dapat kita pahami bahwa manajemen waktu sangat berperan untuk menjalankan peran ganda seperti itu.

Selain itu, lanjutnya, sebagaimana diceritakan Ibu Nevi dalam bukunya, kesabaran dan komitmen dalam keluarga juga sangat berperan penting dalam kehidupan seorang perempuan yang aktif di dalam rumah dan di luar rumah.

"Energi Perempuan Minang, yang dipilih sebagai judul buku ini menyiratkan makna bahwa pada kultur Minangkabau perempuan ditempatkan pada hirarki yang terhormat. Dan agaknya itu



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Jadi ada bagian pengalaman yang saya catat tapi tidak masuk ke dalam buku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya ada bagian-bagian yang mungkin saya lupa mencatatnya, maklum itulah salah satu sifat lemah manusia, tidak semuanya serta merta teringat pada hal-hal yang sudah lama berlalu"

yang memberi semangat untuk banyak perempuan Minang termasuk Nevi Zuairina untuk banyak berperan dalam sejarah

perjuangan bangsa," kata Puan. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS Himbau Warga agar **Jangan** **Khawatir** untuk Divaksin

## KUTIPAN

Singkawang (05/09) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Barat agar jangan khawatir akan obat atau makanan apalagi vaksin yang sudah terdaftar dan tersertifikasi oleh BPOM.

"Saya dan keluarga saya juga pernah menjadi penyintas Covid 19" Ucap Bang Alif dalam Acara komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama BPOM di Kota Singkawang, Ahad (05/09).

Anggota PKS Kalimantan Barat juga diingatkan oleh Bang Alif agar jangan takut untuk di vaksin.

"Karena ini kondisi darurat, agar kehidupan bisa kembali normal, vaksin menjadi salah satu solusi," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI pada kegiatan KIE yang diadakan

Balai Besar POM di Pontianak.

"Indonesia masih belum mencapai target Herd Imunity, apalagi di Kalimantan Barat, maka sebaiknya kita upayakan bersama lewat Vaksinasi," tambah Bang Alif Sapaan Akrabnya.

Bang Alif pun mengajak Berdoa bersama peserta acara, agar Indonesia kembali normal dan masyarakat bisa beraktifitas seperti sedia kala.



## H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Karena ini kondisi darurat, agar kehidupan bisa kembali normal, vaksin menjadi salah satu solusi. Indonesia masih belum mencapai target Herd Imunity, apalagi di Kalimantan Barat, maka sebaiknya kita upayakan bersama lewat Vaksinasi"



### Profil

- Nama Lengkap  
**Dr. H. Almuazzamil Yusuf, M.Si**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Tanjung Karang, 06 Juni 1965**
- Dapil  
**Lampung I**



### Pendidikan

- **S1** : Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- **S2** : Ilmu Komunikasi Politik Univ. Sahid
- **S3** : Ilmu Komunikasi Politik Univ. Sahid
- International Relation, (Second Certificate), CAS-Islamabad, Pakistan
- Pendidikan Bahasa Inggris di Sidney, Australia (1 Tahun)
- Pendidikan Bahasa Arab di Kairo, Mesir (1 Tahun)



### Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR/MPR RI**, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024
- **Wakil Ketua Komisi III DPR-RI**, 2005-2007, 2012-2014
- **Wakil Ketua Baleg DPR-RI**, 2007-2009
- **Wakil Ketua Komisi II DPR**, 2015-2017
- **Wakil Ketua FPKS MPR RI**, 2014-2019, 2019-2024
- **Tim Sosialisasi 4 Pilar MPR RI**, 2004-sekarang



# ALMUZZAMMIL YUSUF



### Riwayat Organisasi

- **Ketua Deklarator PKS**, 2001-2002
- **Wakil Presiden PKS**, 2002-2004
- **Ketua Bid. Polhukam DPP PKS**, 2020-2025
- **Koordinator Kaukus Parlemen Untuk Palestina**, 2007-2014
- **Striker Tim Sepakbola U16 DKI 1981 & Eksebisu MBFA Kyoto Jepang 1981**
- **Pembicara pada seminar pembinaan keluarga, pemuda, pelajar, mahasiswa dan kajian politik**



### Media Sosial

- f** : Almuazzamil Yusuf
- t** : @Muzzammil\_Yusuf
- i** : @almuazzamil.yusuf
- u** : Al Muzzammil Yusuf
- g** : [www.almuazzamliyusuf.id](http://www.almuazzamliyusuf.id)



### Keluarga

- **Istri** : Nurul Hidayati K Ubaya, S.S., MBA
- **Anak** : 1 Laki-Laki  
2 Perempuan  
(Sudah menikah)
- **Cucu** : 3 Orang

# Ayo Vaksinasi PKS Jakbar Adakan Vaksinasi Tahap 2

KUTIPAN

Jakarta (05/09) --- Kegiatan Vaksinasi yang sudah memasuki bulan September 2021, terus digulir di wilayah DKI Jakarta. Berbagai pihak terus menggalakkan giat Vaksinasi agar tercipta herd Immunity di lingkungan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera, salah satu Partai yang turut mengadakan Giat Vaksinasi, pada hari Sabtu, (04/09/2021) mengatakan giat Vaksinasi tahap kedua dengan tema "Ayo Vaksin PKS Jakarta Barat." Giat vaksinasi ini merupakan kelanjutan dari giat vaksin pertama (1-7/08/2021). Acara diadakan di SDN 01/08 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dimulai pukul 07.30-11.30 wib.

Acara dimulai pada pukul 07.00 wib dengan memulai registrasi untuk penerima Vaksinasi tahap 2 dengan jenis vaksinasi Sinovac. Kemudian pada pukul. 09.00 wib diadakan acara ceremonial pembukaan dengan kata sambutan dari anggota DPR RI fraksi PKS, Drs. H. Adang Darajatun

Dukungan datang dari Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Drs. Adang Darajatun, yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi PKS yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya vaksinasi Covid-19 di masa pandemi ini. Juga kepada masyarakat yang dengan kesadaran tinggi berantusias melakukan vaksinasi.

"Terima kasih kepada masyarakat yang antusias datang untuk divaksin. Semoga dengan ini, imunitas diri semakin tinggi. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin tangguh. Layanan vaksinasi gratis dari PKS di kondisi pandemi seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara," ujarnya.



**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Terima kasih kepada masyarakat yang antusias datang untuk divaksin. Semoga dengan ini, imunitas diri semakin tinggi. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin tangguh. Layanan vaksinasi gratis dari PKS di kondisi pandemi seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara"

# Bersama Presiden PKS, Hamid Noor Yasin Serahkan Bantuan Ambulance dan 1,7 Jt paket Sembako

## KUTIPAN

Karanganyar (29/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin bersama Presiden PKS Ahmad Syaikh, Ketua DPW PKS Jawa Tengah Muhammad Haris serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan pimpinan DPD PKS Karanganyar, Wonogiri dan Sragen menyalurkan bantuan berupa mobil Ambulance dan 1,7 juta sembako bagi masyarakat terdampak covid-19 di Karanganyar, Ahad, (29/08).

Acara dilaksanakan di halaman kantor DPD PKS Karanganyar ini, berlangsung dengan disiplin protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut Hamid Noor Yasin Anggota DPR RI dari Dapil Jateng 4 Wonogiri Sragen dan Karanganyar menegaskan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar agar bisa terus melayani rakyat.

"Ini merupakan bukti nyata bahwa PKS merupakan partai yang sangat peduli atas persoalan-persoalan rakyat dan

bangsa di masa pandemi ini. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berakhir dan kami juga berharap mobil-mobil ambulance ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dioptimalkan untuk melayani masyarakat di daerahnya masing-masing terutama di masa Pandemi Covid-19 saat ini," ungkapnya.

PKS, kata Hamid, konsisten bersikap bahwa kunci sukses pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan semua dalam

mengendalikan dan

menghentikan pandemi ini.

"Semakin sukses kita mengendalikan dan menghentikan pandemi ini, maka perekonomian nasional kits akan cepat pulihcepat bangkit dan kesehatan masyarakat kita akan terjaga" imbuhnya.

Sutarno yang merupakan perwakilan warga, yang mendapatkan paket sembako menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan PKS di masa Pandemi Covid-19.

"Matur nuwun PKS sampun paringi sembako nulung tiang alit mugu-mugi berkah," pungkasnya.

Sementara itu Presiden PKS, Ahmad Syaikh dalam sambutannya menegaskan PKS harus hadir mulai dari struktur tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, kelurahan hingga dusun-dusun RW dan RT.

"Para Anggota Dewan secara bersama-sama sukseskan program PKS peduli berbagi 1,7 juta paket sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19," terang Syaikh.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

"Ini merupakan bukti nyata bahwa PKS merupakan partai yang sangat peduli atas persoalan-persoalan rakyat dan bangsa di masa pandemi ini. Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berakhir dan kami juga berharap mobil-mobil ambulance ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dioptimalkan untuk melayani masyarakat di daerahnya masing-masing terutama di masa Pandemi Covid-19 saat ini

# Kunjungan Dapil, Bukhori Serahkan Puluhan Ribu Paket Bansos Kesehatan dan Bantuan UMKM

## KUTIPAN

Semarang (30/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyerahkan sebanyak 40 ribu paket bantuan sosial kesehatan yang terdiri dari masker, vitamin, dan obat-obatan sederhana untuk masyarakat tidak mampu dan/atau masyarakat terdampak Covid-19 di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Sabtu (28/8).

Bantuan tersebut diserahkan kepada perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan nantinya akan disalurkan melalui Karang Taruna.

Dalam acara serah terima bertempat di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu, Bukhori menuturkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

Fraksi PKS di Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial memiliki perhatian yang sama dalam upaya menanggulangi dampak sosial pandemi di Jawa Tengah. Sebab itu, pembagian

masker dan paket vitamin diharapkan mampu membantu masyarakat dari aspek pencegahan dari risiko infeksi virus melalui penegakan protokol kesehatan yang memadai dan asupan vitamin bagi tubuh.

"Bantuan ini merupakan usulan kabupaten/kota yang berhasil kami advokasi, dengan harapan manfaatnya bisa kembali pada rakyat. Ini adalah manifestasi dari peran negara yang hadir di tengah masyarakat. Di sisi lain, secara nilai atau jumlah, bantuan ini memang tidak terlalu besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah bentuk perhatian kami

terhadap masyarakat yang tidak pernah surut dalam situasi sulit sekalipun," jelas Bukhori.

Merespons Bukhori, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan politisi PKS tersebut.

"Kami berterima kasih dengan adanya bantuan masker dan vitamin ini. Tentunya bantuan ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Terkadang di daerah bukannya masyarakat tidak mau menggunakan masker. Jangankan untuk membeli masker, hanya untuk makan saja mereka kesulitan," ucap Harso.

Pada hari kedua kunjungan di dapil, Minggu (29/8), Bukhori yang didampingi Kepala Bagian Keuangan Setdipren Pemberdayaan Sosial Kemensos Setyo Budi mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan usaha UMKM untuk KUBE Melati Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Bantuan ini merupakan usulan kabupaten/kota yang berhasil kami advokasi, dengan harapan manfaatnya bisa kembali pada rakyat. Ini adalah manifestasi dari peran negara yang hadir di tengah masyarakat"



# Kunjungi Dapil, Aleg PKS Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Padang

## KUTIPAN

Padang (29/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan bantuan kepada masyarakat korban kebakaran di Kota Padang.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada korban di Asrama TNI AD Cengkeh, Kelurahan Bandarbuat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sabtu (28/08/2021) sore.

"Bantuan ini dilaksanakan atas arahan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim. Beliau minta agar semua anggota PKS ringan tangan membantu masyarakat yang terkena musibah," ujar Hermanto dalam sambutannya usai penyerahan bantuan.

Hermanto juga menyampaikan duka yang mendalam kepada 10 kepala keluarga yang rumahnya terbakar dan meminta agar para korban bersabar atas

musibah yang terjadi.

"Dengan kesabaran semoga nanti mendapatkan ganti yang lebih baik," papar legislator dari FPKS DPR.

Belum lama ini si jago merah melalap 10 rumah di Asrama TNI AD Cengkeh. Api menjalar dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Dibalik suasana duka, selalu saja ada suasana suka. Semoga kondisi bapak dan ibu pulih, sehat," pungkas Hermanto.

Dalam kegiatan tersebut Hermanto didampingi oleh tokoh muda setempat Dede Suhendi dan Okbar Sixtoni.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Bantuan ini dilaksanakan atas arahan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim. Beliau minta agar semua anggota PKS ringan tangan membantu masyarakat yang terkena musibah"





*Turut  
Berduka  
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas Wafatnya

## **H. Eddy Agus Wangsa Widjaja**

Ayahanda dari H. Ecky Awal Mucharam  
(Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI)

Semoga segala kebaikan & amal ibadah  
almarhum diterima oleh Allah SWT. Semoga  
keluarga yang ditinggalkan diberikan  
kekuatan dan kesabaran.

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Sekretaris Jenderal PKS



# Terima Aspirasi KOPEL dan ICW, PKS: Pengadaan Laptop Sekolah Kemen-dikbud Terlalu Dipaksakan

## KUTIPAN

Jakarta (7/9) – Fraksi PKS menerima aspirasi virtual dari Komite Pengawasan Legislatif (KOPEL) dan Indonesian Corruption Watch (ICW)

terkait Program Pengadaan Laptop untuk Digitalisasi Sekolah Kemendikbudristek, Selasa (7/9). Dalam aspirasinya, mereka meminta agar program digitalisasi berupa pengadaan Laptop tersebut ditunda.

“Program ini banyak masalah, mulai dari pengadaannya dari Dana Alokasi Khusus yang kurang transparan sehingga memicu penyelewengan, hingga belum sesuai skala prioritas. Banyak fasilitas sekolah di Kabupaten Bogor yang notabene dekat Ibukota memprihatinkan” ujar Direktur KOPEL Anwar Razak.

Peneliti ICW Dewi Angraini menutarakan bahwa proyek ini bermasalah mulai dari operating system (OS) yang kurang familiar, hingga kebijakan tingkat komponen

dalam negeri (TKDN) yang cenderung inefisien dan monopoli. “Pengadaan Laptop dari perusahaan domestik dengan tingkat komponen dalam negeri memang terlihat lebih pro lokal, namun hanya ada 6 perusahaan yang mampu melakukan itu sehingga ini bisa mengarah ke monopoli” ujar Dewi.

Senada dengan keluhan tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa juga menyatakan penolakannya terhadap pengadaan laptop sebesar Rp.3,7 Triliun untuk program digitalisasi. Menurut beliau, hal ini akan menimbulkan masalah baru.

“Pengadaan laptop sekolah ini belum realistis, baik dari segi skala prioritas maupun dari kesiapan sekolah-sekolah. Dari segi spek saja, misalnya,

OS Chromebook yitu tidak bisa berjalan jika tidak ada internet yang cepat. Lantas, bagaimana dengan sekolah-sekolah seperti di Berau yang kondisi internet bahkan listriknya masih terbatas” kritik Anggota Komisi X tersebut.

Karena itu, penggunaan laptop ini belum tentu bermanfaat sehingga menjadi mudazir. Pengawasan dan pendampingannya juga sulit sehingga rawan terjadi penyelewengan. “Saya khawatir proyek ini akhirnya menjadi catatan BPK” ujar Ledia.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Sakinah Aljufri juga menyoroti proyek ini karena masalah skala prioritas. Menurutnya, di daerah-daerah pelosok bahkan yang di daerah yang dekat Ibukota, banyak siswa belajar dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Proyek Laptop ini tidak terlalu penting. Banyak di dapil pelosok kondisi kelas para siswa sangat tidak layak. Bahkan di daerah yang dekat Jakarta seperti Bogor, situasinya cukup buruk, apalagi di daerah 3T?” ujar Anggota DPR dari



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

“Pengadaan laptop sekolah ini belum realistis, baik dari segi skala prioritas maupun dari kesiapan sekolah-sekolah.

Dari segi spek saja, misalnya, OS Chromebook yitu tidak bisa berjalan jika tidak ada internet yang cepat. Lantas, bagaimana dengan sekolah-sekolah seperti di Berau yang kondisi internet bahkan listriknya masih terbatas”

Dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Dia juga menutarakan bahwa di Sulawesi Tengah banyak sekolah-sekolah yang masih rusak akibat Gempa

Sulteng 2018 yang harus diperhatikan ketimbang mengadakan laptop baru.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# HNW Dukung Gelar Pahlawan Nasional Bagi Sejumlah Tokoh yang Berjasa bagi Indonesia Merdeka

## KUTIPAN

Jakarta (07/09) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mendukung penghormatan terhadap para Bapak dan Ibu Bangsa yang telah berjasa bagi hadirnya Indonesia Merdeka, dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Seperti, lanjut Hidayat, Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau yang dikenal dengan Habib Ali Kwitang, Rahmah El Yunusiah Pendiri sekolah Diniyah Putri Padang Panjang, Syaikhana Khalil (Guru bagi KH Hasyim Asyari dan KH A Dahlan) serta Anggota BPUPKI KH A. Sanusi, atas jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan hadirnya Indonesia Merdeka.

"Saya mendukung penuh apa yang diusulkan oleh berbagai pihak agar Pemerintah memberikan pengakuan dan gelar Pahlawan Nasional, juga sebagai pengalaman ajaran Bung Karno: Jas Merah (Jangan

Sekali-kali Melupakan Sejarah), seperti kepada Habib Ali Kwitang, Rahmah El Yunusiah, KHA Sanusi dan Syaikhana Khalil, karena perjuangan dan kontribusi mereka untuk hadirkan Indonesia Merdeka, sangatlah nyata," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (07/09), sesudah menghadiri pertemuan dengan Anggota DPRD DKI bersama Forum Silaturahmi Majelis Taklim se-Jakarta Pusat.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana perjuangan dan kontribusi mereka untuk

eksistensinya Indonesia Merdeka, seperti Habib Ali Kwitang yang sangat dekat dengan Bung Karno.

"Habib Ali Kwitang yang membantu dan menyelamatkan Bung Karno dengan memberikan tempat persembunyian di Masjid Kwitang dari kejaran penjajah Belanda dan Jepang," pungkasnya.

Bahkan, lanjut HNW, berdasarkan berbagai informasi, Bung Karno sempat 'nyantri' dengan Habib Ali Kwitang selama berbulan-bulan atas saran dari tokoh Betawi M Husni Thamrin.

"Habib Ali Kwitang juga sangat berjasa untuk dukungan atas kemerdekaan Indonesia dan penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia di kalangan Umat Islam melalui jaringan para Habaib. Hingga kemerdekaan Indonesia cepat menyebar dan didukung oleh Umat hingga ke Majelis Taklim-Taklim. Karena Habib Ali Kwitang juga pendiri dan pimpinan pertama Majelis Taklim Kwitang



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"PKS sangat mendukung agar Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada para Ulama (termasuk Ulama Perempuan), Habaib dan Bapak/Ibu Bangsa yang telah terbukti jasa dan dharmabaktinya untuk "

yang merupakan salah satu cikal bakal organisasi-organisasi Majelis Taklim di Indonesia, yang ikut berjuang bagi hadir dan eksis nya

Indonesia merdeka," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Forum Dialog 5 Benua terkait  
Penanganan Covid 19

# Sukamta: Siap untuk Menampung Masukan dan Aspirasi

## KUTIPAN

Jakarta (29/08) – Anggota Komisi I FPKS DPR RI Sukamta mengatakan pentingnya mendengarkan aspirasi dari para diaspora mengenai penanganan pandemi Covid-19 di seluruh dunia sebagai bahan komparasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia

Hal tersebut disampaikan dalam Forum Dialog 5 Benua, Minggu (29/08).

Dalam paparannya, Sukamta mengaku Forum Dialog 5 Benua yang diselenggarakan oleh DPP PKS ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat diadakan secara rutin setiap bulan dengan mengangkat tema-tema yang relevan.

"Intinya kita mau mendengar masukan dari saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yaitu para diaspora. Dan juga barangkali ada aspirasi-aspirasi yang

diperlukan baik itu sifatnya untuk kontribusi ke dalam tanah air atau persoalan-persoalan yang perlu dilakukan advokasi," paparnya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga mengapresiasi para diaspora yang telah berbagi mengenai cara pengendalian Covid-19 di berbagai negara, salah satunya Rina Edwar yang telah berada di Amerika Serikat (AS) selama lebih dari 10 tahun. Rina menuturkan, pemerintah AS telah menerapkan pembatasan aktivitas walaupun bukan total lockdown sejak

Maret 2020. Bahkan pemerintah memberikan insentif kepada warganya sebagai stimulus di masa pandemi.

"Pemerintah AS memberikan stimulus langsung dengan cara memberikan individual check sekitar 1200 USD, anak-anak yang berusia 12-17 tahun mendapat 500 USD lalu ditambah 600 USD perminggu untuk orang-orang yang di PHK." imbuhnya.

Tak jauh berbeda, dikatakan Septi Panca Sakti yang merupakan seorang praktisi kesehatan, Pemerintah Jerman menerapkan beberapa kebijakan dalam menekan penyebaran virus Covid-19.

"Selain wajib memakai masker, pemerintah menerapkan kebijakan 3 G yaitu Geimpft atau terimunisasi, Genessen atau sembuh dari covid, dan Getestet atau hasil test untuk daerah yang memiliki kasus lebih dari 50. Hal ini cukup ampuh untuk memutus rantai penyebaran Covid-19," tutur Septi.

Sebagai penutup, seorang mahasiswa S2 dari Kuwait, Naimah menjelaskan betapa pemerintah Kuwait getol dalam pelaksanaan program vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity. Meskipun demikian, Naimah mengaku ada sedikit kendala terkait sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang tidak dapat terbaca di Kuwait. Hal tersebut diharapkan Naimah dapat



## H. SUKAMTA, Ph.D

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS

"Intinya kita mau mendengar masukan dari saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yaitu para diaspora. Dan juga barangkali ada aspirasi-aspirasi yang diperlukan baik itu sifatnya untuk kontribusi ke dalam tanah air atau persoalan-persoalan yang perlu dilakukan advokasi

menjadi pembelajaran dan saran yang dapat disalurkan ke pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Kuwait begitu concern dengan layanan kesehatan baik bagi masyarakat Kuwait maupun pendatang atau ekspatriat. Juga

secara terus menerus memantau warga Indonesia di Kuwait bersama KBRI di Kuwait. Namun masih ada kendala di sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak terintegrasi di Kuwait." tutupnya.



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***